

# 2023

# LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA  
MADIUN

oleh:

**Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Madiun tahun 2023 telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang seharusnya.

Pemerintah Kota Madiun merupakan pemerintahan daerah yang berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 berperan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan perannya tersebut, Pemerintah Kota Madiun melalui visi dan misinya telah melaksanakan program-program pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, berkinerja tinggi, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 disusun sebagai bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan ketidakberhasilan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu Laporan Kinerja

merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maupun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun, Maret 2023

**WALIKOTA MADIUN**



**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	KP – 1
DAFTAR ISI.....	DI – 1
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I – 1
A. Gambaran Umum Daerah .....	BAB I – 4
B. Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	BAB I – 31
C. Sistematika.....	BAB I – 40
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .....	BAB II – 1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 .....	BAB II – 2
B. Perjanjian Kinerja.....	BAB II – 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	BAB III – 1
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	BAB III – 2
1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran.....	BAB III – 2
2) Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	BAB III – 3
3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	BAB III – 6
1. Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) .....	BAB III – 7
2. Misi Kedua : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.....	BAB III – 33
3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun .....	BAB III – 45
4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.....	BAB III – 63

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	BAB III – 94
BAB IV PENUTUP.....	BAB IV – 1
A. Kesimpulan.....	BAB IV – 1
B. Permasalahan .....	BAB IV – 2
C. Upaya Meningkatkan Kinerja.....	BAB IV – 4

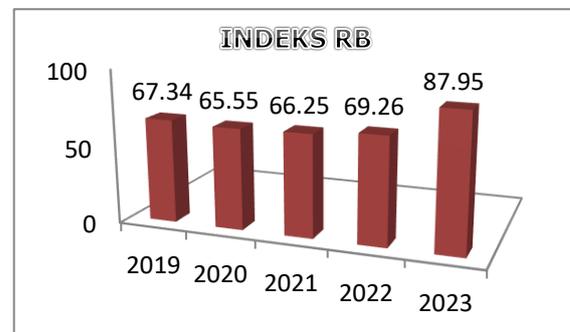
# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. Terdapat 5 tujuan dan 11 sasaran strategis tahun 2023 di Pemerintah Kota Madiun. Realisasi dari 7 indikator tujuan adalah 1 indikator belum tercapai, 1 indikator belum bisa dihitung capaiannya karena Lembaga penghitung data tidak melakukan penghitungan sehingga angka terakhir hanya sampai dengan tahun 2021, 5 indikator tercapai. Sedangkan untuk indikator sasaran secara umum tercapai yaitu 9 indikator tercapai, 2 indikator belum tercapai. Keberhasilan program-program di Pemerintah Kota Madiun sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh komponen baik internal maupun eksternal. Uraian tingkat ketercapaian atau ketidaktercapaian indikator lebih detil diuraikan pada BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tidak hanya menyajikan data tahun 2023 saja melainkan juga pencapaian target tahun keempat RPJMD 2019-2024.

**Tujuan 1:**  
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities

Indeks RB Kota Madiun		
Target	Realisasi	Capaian
69,26 (B)	87,95 (A-)	126,98%



**Sasaran 1:**  
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)**

Target	Realisasi	Capaian
79 (BB)	80,08 (A)	101,37%

**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Target	Realisasi	Capaian
Sangat Tinggi	3,12	-

**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Target	Realisasi	Capaian
3,06	4,45	145,42%



**Sasaran 2:**  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun**

Target	Realisasi	Capaian
86,55	88,028	101,70%

**Indeks Inovasi Daerah**

Target	Realisasi	Capaian
58,4	52,62	90,10

**Tujuan 2:**  
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

**Indeks Kenyamanan Kota (Liveable City)**

Target	Realisasi	Capaian
90,33	91,93	101,77%

**Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)**



**Sasaran 3:**  
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

**Indeks Infrastruktur**

Target	Realisasi	Capaian
98,42	98,44	100,02%

**Sasaran 4:**  
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Target	Realisasi	Capaian
57,85	60,32	104,26%



**Tujuan 3:**  
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Indeks Pembangunan Manusia		
Target	Realisasi	Capaian
82,47	83,71	101,50%

Indeks Pembangunan Gender		
Target	Realisasi	Capaian
94,57	94,57*	100,14%

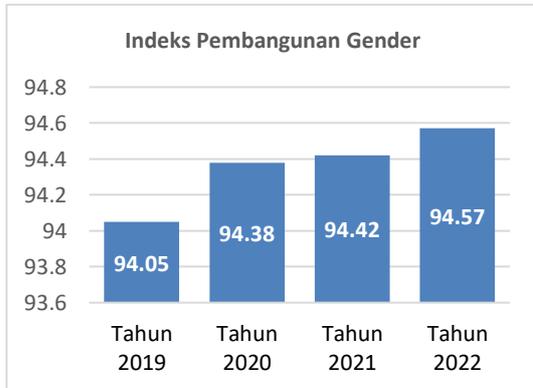


**Sasaran 5:**  
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Harapan Lama Sekolah		
Target	Realisasi	Capaian
14,42	14,44	100,14%

Rata-rata Lama Sekolah		
Target	Realisasi	Capaian
11,39	11,82	103,77%



**Sasaran 6:**  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup		
Target	Realisasi	Capaian
57,85	60,32	104,26%

**Sasaran 7:**  
Meningkatnya Pemberdayaan Gender

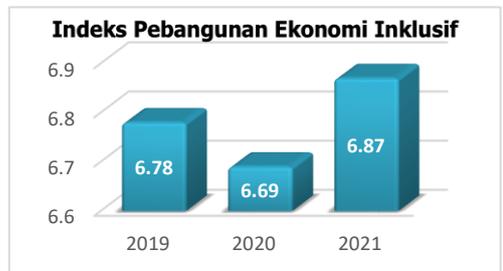
Indeks Pemberdayaan Gender		
Target	Realisasi	Capaian
57,85	60,32	104,26%



**Tujuan 4:**  
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		
Target	Realisasi	Capaian
6,89	6,87**	-

\*\*Realisasi Tahun 2022





**Sasaran 8:**  
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka		
Target	Realisasi	Capaian
61,15	5,85	104,88%

**Sasaran 9:**  
Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

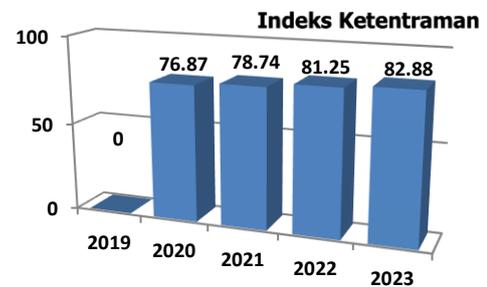
% Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		
Target	Realisasi	Capaian
10,16	5,60	55,11%

% Pertumbuhan PDRB sektor jasa		
Target	Realisasi	Capaian
11,32	24,7	218,19%

**Tujuan 5:**  
Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Indeks Ketenteraman		
Target	Realisasi	Capaian
77,15	82,88	107,42%

Indeks Gini		
Target	Realisasi	Capaian
0,329	0,416	73,56%



**Sasaran 11:**  
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Kerukunan		
Target	Realisasi	Capaian
74,46	77,80	104,48%

Indeks Rasa Aman		
Target	Realisasi	Capaian
76,27	82,47	108,12%

**Sasaran 10:**  
Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Angka Kemiskinan		
Target	Realisasi	Capaian
4,77	4,74	100,63%

# BAB I PENDAHULUAN

Birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah dan fleksibel berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan.

Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Tata kelola pemerintahan yang baik diawali dari aparatur pemerintah, sehingga reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak yang jelas dan diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2023, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Madiun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Madiun. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Madiun;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Madiun yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Mejadikan masukan dan umpan balik bagi penyusunan perencanaan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai upaya dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Madiun guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Madiun terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Madiun.

## **A. Gambaran Umum Daerah**

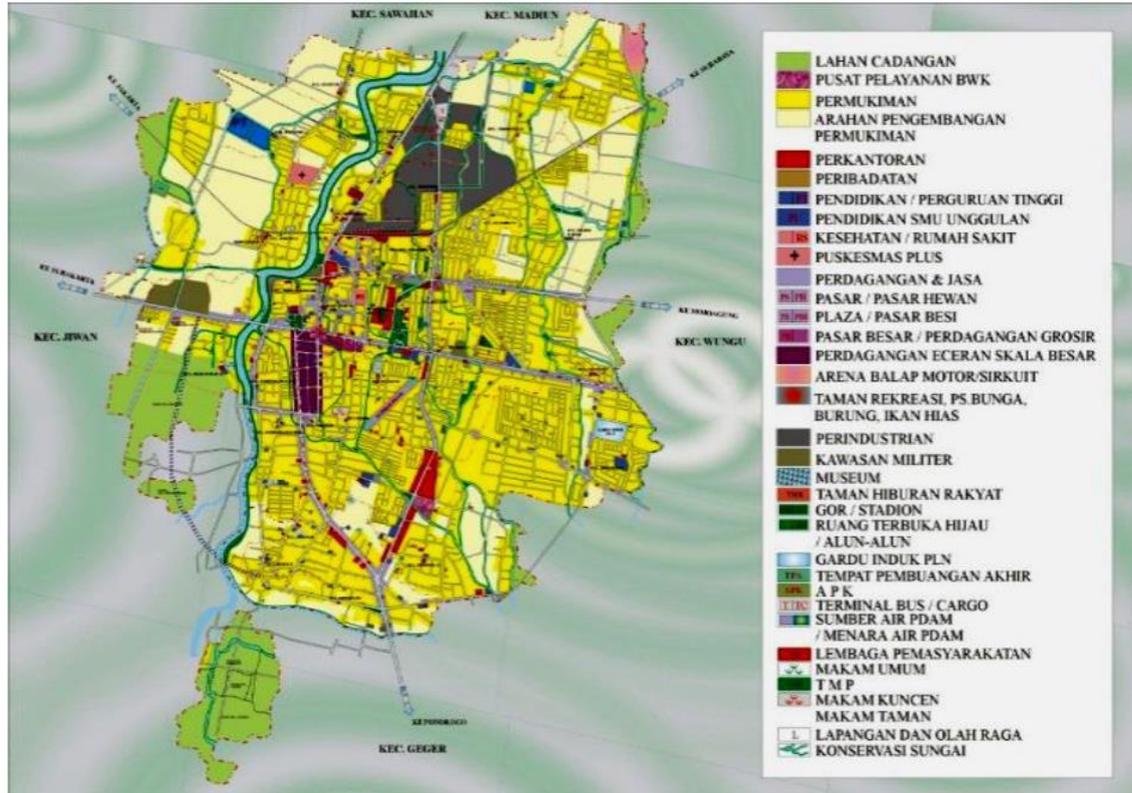
### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Kota Madiun mempunyai letak yang strategis karena

menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga posisi ini menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat.

Secara astronomis Kota Madiun terletak di dataran rendah antara 70-80 Lintang Selatan, dan antara 1110-1120. Letak Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 meter di atas dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 200C hingga 350C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2011 di Kota Madiun antara 229 mm sampai 413 mm. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun.

**Gambar I.1. Wilayah Administrasi Kota Madiun**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

## Batas-batas wilayah Kota Madiun

**Sebelah utara :**

Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun

**Sebelah selatan :**

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

**Sebelah timur :**

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

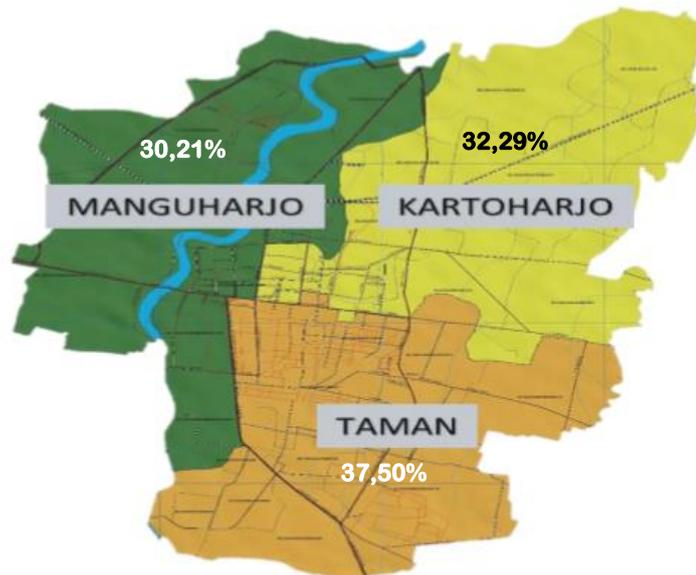
**Sebelah barat :**

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Kota Madiun mempunyai luas wilayah 33,23 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu meliputi :

- ✚ Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km<sup>2</sup> (30,21%)
- ✚ Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km<sup>2</sup> (37,50%)
- ✚ Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km<sup>2</sup> (32,29%)

**Gambar I.2. Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan**



Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan. Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- ✚ Kecamatan Manguharjo terdiri dari 324 RT dan 88 RW ;
- ✚ Kecamatan Taman terdiri dari 396 RT dan 107 RW;
- ✚ Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun**

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah	
			RW	RT
I.	<b>Manguharjo</b>	<b>10,04</b>	<b>88</b>	<b>324</b>
1.	Manguharjo	1,40	8	35
2.	Sogaten	1,12	9	29
3.	Patihan	0,84	6	22
4.	Ngegong	1,34	5	17
5.	Winongo	2,00	11	37
6.	Madiun Lor	0,73	9	41
7.	Pangongangan	0,61	9	26
8.	Nambangan Lor	0,98	16	71
9.	Nambangan Kidul	1,02	15	46
II.	<b>Taman</b>	<b>12,46</b>	<b>107</b>	<b>396</b>
1.	Mojorejo	1,54	14	64
2.	Pandean	0,32	18	60
3.	Banjarejo	1,92	9	35
4.	Kuncen	1,83	4	9
5.	Manisrejo	0,92	12	60
6.	Kejuron	1,59	15	50
7.	Josenan	1,06	9	31
8.	Demangan	1,26	11	36
9.	Taman	2,02	15	51
III.	<b>Kartoharjo</b>	<b>10,73</b>	<b>74</b>	<b>309</b>
1.	Kartoharjo	0,94	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	0,81	9	43
3.	Klegen	0,84	10	48
4.	Kanigoro	1,62	12	52
5.	Pilangbango	1,21	5	22
6.	Rejomulyo	2,03	11	38
7.	Sukosari	0,55	6	18
8.	Tawangrejo	1,77	6	24
9.	Kelun	0,96	6	26
Jumlah		<b>33,23</b>	<b>269</b>	<b>1.029</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun

Berdasarkan kondisi topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian  $\pm$  63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun terletak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m – 500 m.

## 2. Kondisi Demografis

Dari aspek demografi, Kota Madiun berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 201.992 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.645 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.152 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala

Keluarga di Kota Madiun sebanyak 72.907 KK yang tersebar di tiga wilayah kecamatan. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.2. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARTOHARJO	29.504	30.672	60.176
2	MANGUHARJO	42.115	43.743	85.858
3	TAMAN	27.389	28.569	55.958
	<b>JUMLAH</b>	<b>99.008</b>	<b>102.984</b>	<b>201.992</b>

*Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2023*

**Tabel I.3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARTOHARJO	14.864	5.190	20.054
2	MANGUHARJO	22.554	7.894	30.448
3	TAMAN	16.187	6.218	22.405
	<b>JUMLAH</b>	<b>53.605</b>	<b>19.302</b>	<b>72.907</b>

*Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2023*

Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel I.4. Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Penduduk Berdasarkan Pendidikan :</b>					
<b>Belum Sekolah;</b>	31.374	32.536	33.177	33.495	35.511
<b>Belum Tamat SD</b>				18.483	18.156
<b>Tamat SD;</b>	29.266	28.253	26.006	24.843	24.581
<b>Tamat SLTP;</b>	28.787	28.048	26.027	25.314	25.190
<b>Tamat SLTA;</b>	73.045	73.008	69.421	70.350	70.792
<b>Tamat D-I/II;</b>	498	502	519	553	563
<b>Tamat D-III;</b>	5.761	5.912	5.770	6.033	6.145
<b>Tamat S-1;</b>	20.071	20.536	20.170	21.152	21.544
<b>Tamat S-2;</b>	1.391	1.417	1.415	1.490	1.524
<b>Tamat S-3.</b>	35	39	41	47	49

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023

**Tabel I.3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2023**

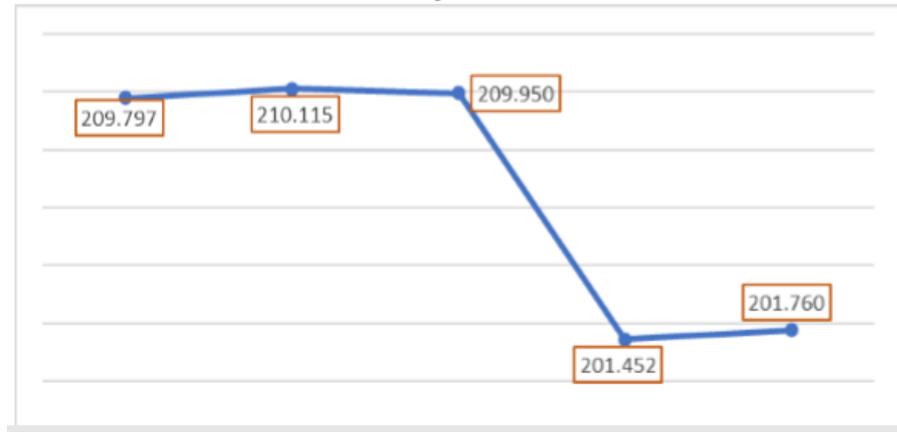
NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	37.262
2	Mengurus Rumah Tangga	32.583
3	Pelajar/Mahasiswa	40.193
4	Pensiunan	5.749
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6.009
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.623
7	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	940
8	Jasa dan Wiraswasta	26.268
9	Karyawan	47.137
10	Buruh/Tukang	5.156
11	Lainnya	68
	<b>JUMLAH</b>	<b>166.025</b>

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2023

Pertumbuhan penduduk dihitung menggunakan variabel jumlah penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Pengolahan data

penduduk sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi, dengan database daerah yaitu Kota Madiun, mulai tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 menggunakan SIAK terpusat. SIAK Terpusat merupakan sistem data administrasi kependudukan (Adminduk) yang disusun berdasarkan prosedur dan memakai standarisasi khusus dimana data langsung masuk pada database dipusat yang dikelola oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga mewajibkan daerah menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan tiap semester oleh pusat.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun selama periode 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2022 yaitu sebesar 0,15%. Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar dari tahun 2021. Adapun penurunan jumlah data penduduk mulai Tahun 2021 dikarenakan adanya data penduduk yang pengolahannya hanya bisa didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh pusat yang berakibat pada perbedaan jumlah penduduk dengan tahun-tahun sebelumnya antara Database Pelayanan pada SIAK Terdistribusi dibandingkan dengan Database SIAK Terpusat.

**Grafik I.1. Laju Pertumbuhan Penduduk**

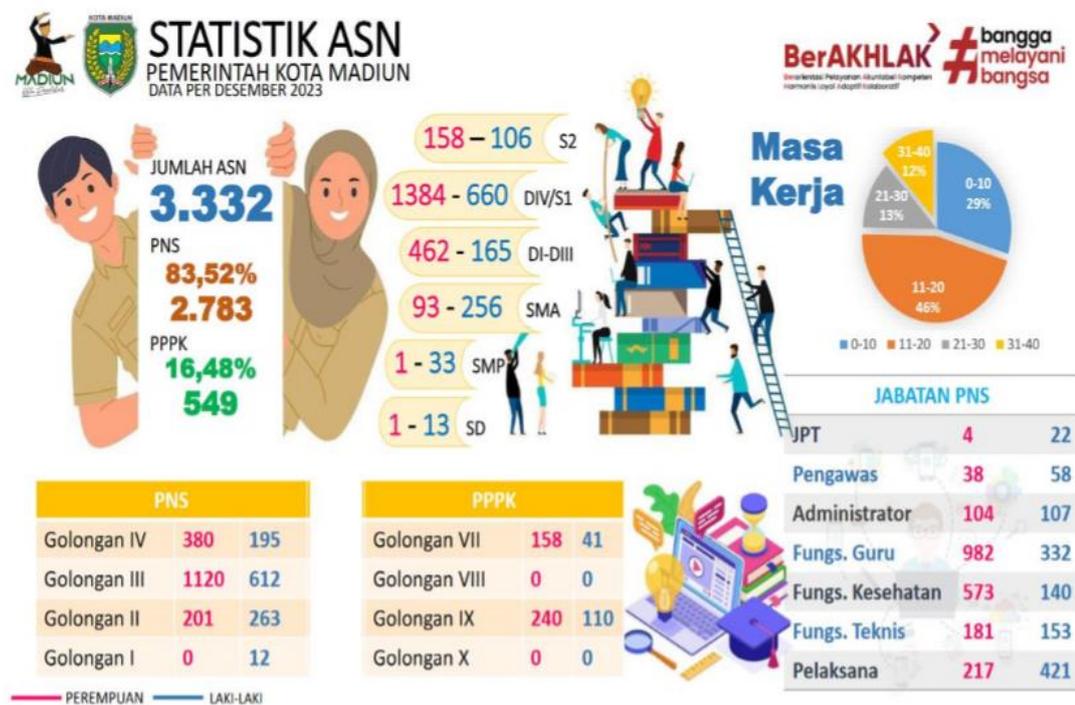
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2023

Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2022 cenderung merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.727 jiwa (42,48%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.167 jiwa (29,82%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.866 jiwa (27,70%).

### 3. Jumlah ASN dan PPPK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif (*agile*) sehingga

mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Kota Madiun. Di Kota Madiun, Jumlah ASN berstatus aktif sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 3.332 yang terdiri dari PNS sejumlah 2.783 (83,52%) dan PPPK 549 (16,48). Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS Pemerintah Kota Madiun berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan sebaran PNS di Perangkat Daerah.



Berdasarkan data diatas Jumlah PNS menurut tingkat Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 sebagian besar berpendidikan DIV/S1 sebanyak 2.044 dan PNS berpendidikan S2 sebanyak 264. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

ASN berdasarkan jenis kelamin di Pemerintah Kota Madiun adalah sebagaimana berikut :



#### 4. Kondisi Makro Ekonomi

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,02	83,71
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,52	5,52*
3	Inflasi	Persen	5,80	5,80*
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,39	5,85
5	Kemiskinan	Persen	4,76	4,74

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2023

\*Data Tahun 2022, Data 2023 belum rilis

### 1.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum dapat dikatakan bahwa naiknya angka IPM menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam periode lima tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan terutama di Tahun 2023. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Peningkatan pertumbuhan IPM Tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan seluruh

indikator pembentuknya baik indeks Kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

**Tabel I.5 IPM Kota Madiun Menurut Komponen**

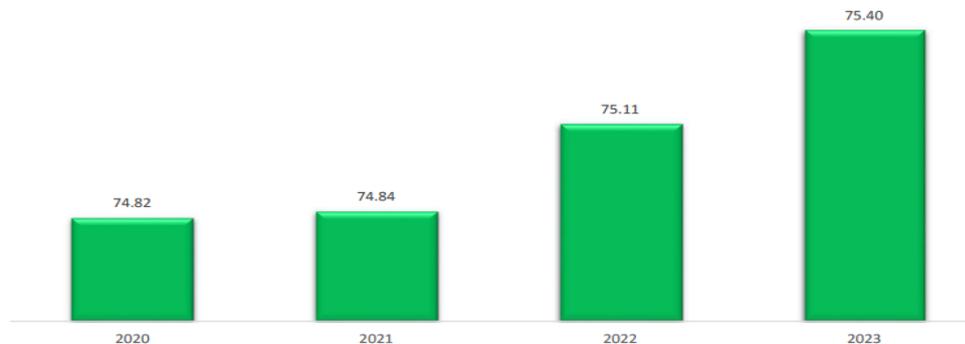
Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)
2020	74,82	14,40	11,14	16.018
2021	74,84	14,41	11,37	16.095
2022	75,11	14,43	11,67	16.503
2023	75,40	14,44	11,82	17.115

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

a) Dimensi Umur Panjang dan Umur Sehat

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2020 hingga 2023, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74,82 tahun (2020) menjadi 75,40 (2023) atau naik sebesar 0,58 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

**Grafik I.5. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun, 2020-2023**



*Sumber : BPS Kota Madiun*

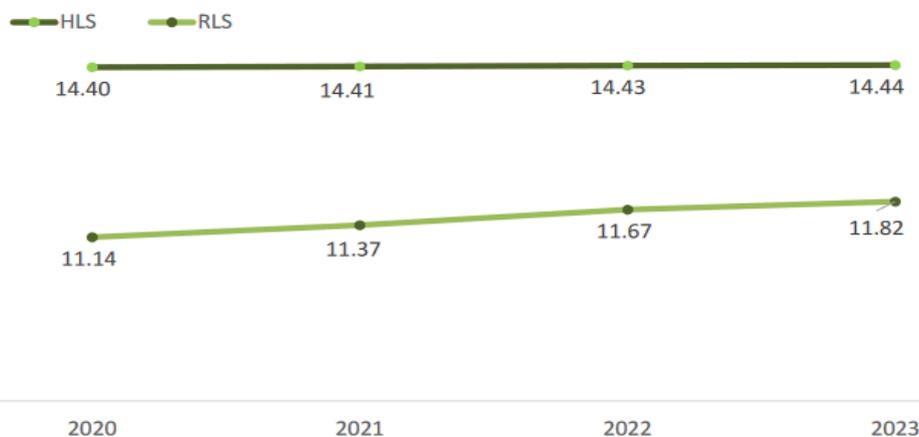
b) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,40 tahun (2020) menjadi 14,44 tahun (2023) atau naik sebesar 0,04 tahun. Sementara

rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,14 tahun (2020) menjadi 11,82 tahun (2023) atau naik 0,68 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan Tingkat pendidikan SMA kelas XI.

Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,11 tahun (2018) menjadi 11,67 tahun (2022) atau naik 0,56 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

**Grafik I.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun, 2020-2023**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2023

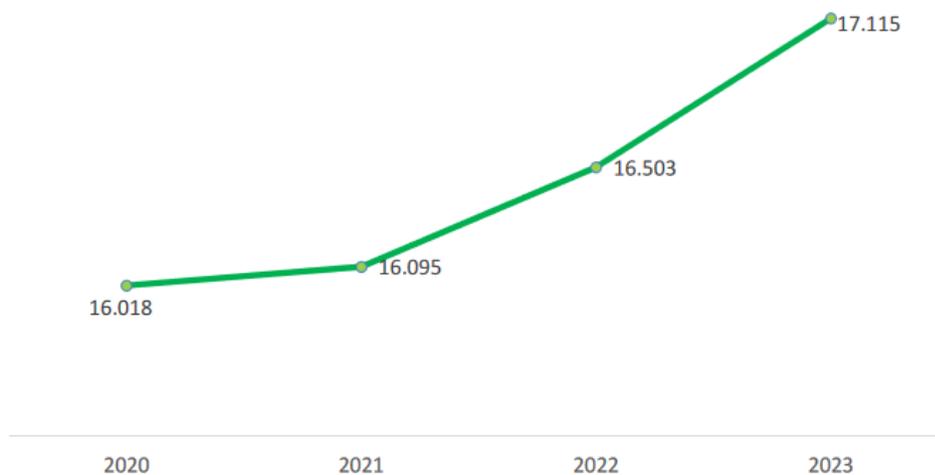
Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,09 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2023, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,44 tahun yang berarti bahwa anak-anak

usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 17,115 juta per tahun, naik sekitar 3,71 persen dibanding tahun 2022 lalu.

**Grafik I.7 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)  
Kota Madiun**



*Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun*

### 1.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah

yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel I.7. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2023*	15.825,61	11.119,55
2022	15.825,61	11.119,55
2021	14.699,83	10.748,10
2020	13.769,29	10.262,44
2019	14.107,34	10.623,07

Sumber : BPS Kota Madiun

\*) Angka Tahun 2022, Tahun 2023 belum rilis

PDRB Kota Madiun selama periode 2018-2021 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai Rp 13,128 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,769 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 14,699 triliun dan tahun 2022 menjadi sebesar 15.825 triliun.

**Tabel I.8**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2019-2022

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pacitan	5,08	-1,84	2,49	5,54
Kabupaten Ponorogo	5,01	-0,90	3,19	3,24
Kabupaten Madiun	5,42	-1,69	3,34	4,32
Kabupaten Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89
Kabupaten Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19
<b>Kota Madiun</b>	<b>5,69</b>	<b>-5,34</b>	<b>4,79</b>	<b>5,52</b>

Sumber: BPS Jawa Timur

### 1.3.3. Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintamasyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat inflasi Kota Madiun mengalami inflasi Inflasi Month to month (mtm) 0,48%, Inflasi Year to date (ytd) 2,12% dan year on year (yoy) November tahun 2023 sebesar 2,72% terendah ke tiga se Provinsi Jawa

Timur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 115. Inflasi yoy November 2023 dipicu karena kenaikan harga dibandingkan November tahun lalu pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi yoy 8,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,38 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,65 persen; kelompok Kesehatan sebesar 2,49 persen. Sementara itu kelompok perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi yoy 0,01 persen; kelompok transportasi deflasi 0,07 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan deflasi 0,97 persen.



### 1.3.4. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 161,43 ribu orang, naik

sebanyak 16,61 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 111,85 ribu orang (69,29 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 105,31 ribu orang penduduk yang bekerja dan 6,54 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 15,04 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 14,69 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 351 orang.

**Tabel I.9 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,  
Agustus 2022 – Agustus 2023**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agustus (2022-2023)	
	Orang	Orang	Orang	Persen
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	144.820	161.428	16.608	11,47
<b>Angkatan Kerja</b>	96.815	111.852	15.037	15,53
<b>-Bekerja</b>	90.627	105.313	14.686	16,20
<b>-Pengangguran</b>	6.188	6.539	351	5,67
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	48.005	49.576	1.571	3,27
	Persen	Persen	Persen poin	
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	6,39	5,85	-0,54	
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	66,85	69,29	2,44	

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2023

Pengangguran terbuka atau sering disebut dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan

kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 69,29 persen, naik 2,44 poin persen dibanding Agustus 2022.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK Laki-Laki sebesar 78,69 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK Perempuan yang sebesar 60,42 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,75 poin persen dan TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 1,86 poin persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,85 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,54 poin persen dibandingkan Agustus 2022. Walaupun secara absolut ada peningkatan jumlah penganggur sebesar 351 jiwa.



Sumber : BPS Kota Madiun

### 1.3.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Upaya nyata di berbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun demi tercapainya upaya pengentasan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan

berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengteluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, Profil Kemiskinan di Jawa Timur, Maret 2023 Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Madiun pada bulan Maret 2023 mencapai 8,46 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,03 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 8,49 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kota Madiun juga mengalami penurunan dari 4,76 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 4,74 persen pada bulan Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kota Madiun pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 605.131,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 53.511,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,7 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 551.620,00.

Selama periode Maret 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang sebanyak 0,03 ribu jiwa, dari 8,49 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 8,46 ribu jiwa pada Maret 2023 atau mengalami penurunan sebesar 0,35 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu tahun juga mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin, dari 4,76 persen pada Maret 2022 menjadi 4,74 persen pada Maret 2023.

**Grafik I. 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun, Maret 2013-Maret 2023 Kota Madiun**

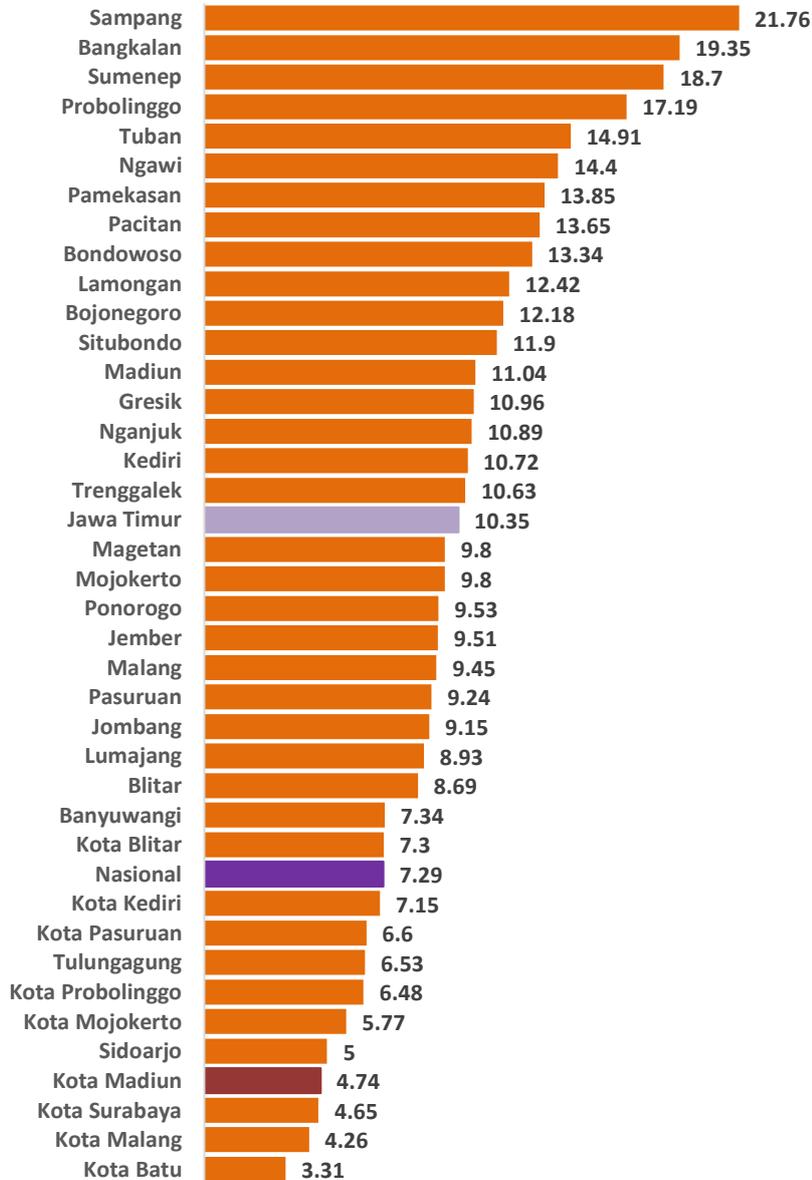


*Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah*

Secara umum, dalam periode 2013-2023 tingkat kemiskinan di Kota Madiun cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 8,70 ribu jiwa, berkurang sebesar 0.24 ribu jiwa menjadi 8,46 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Madiun pada tahun 2013 sebesar 5.02 persen, berkurang sebesar 0.28 poin atau menjadi 4,74 persen pada tahun 2023.

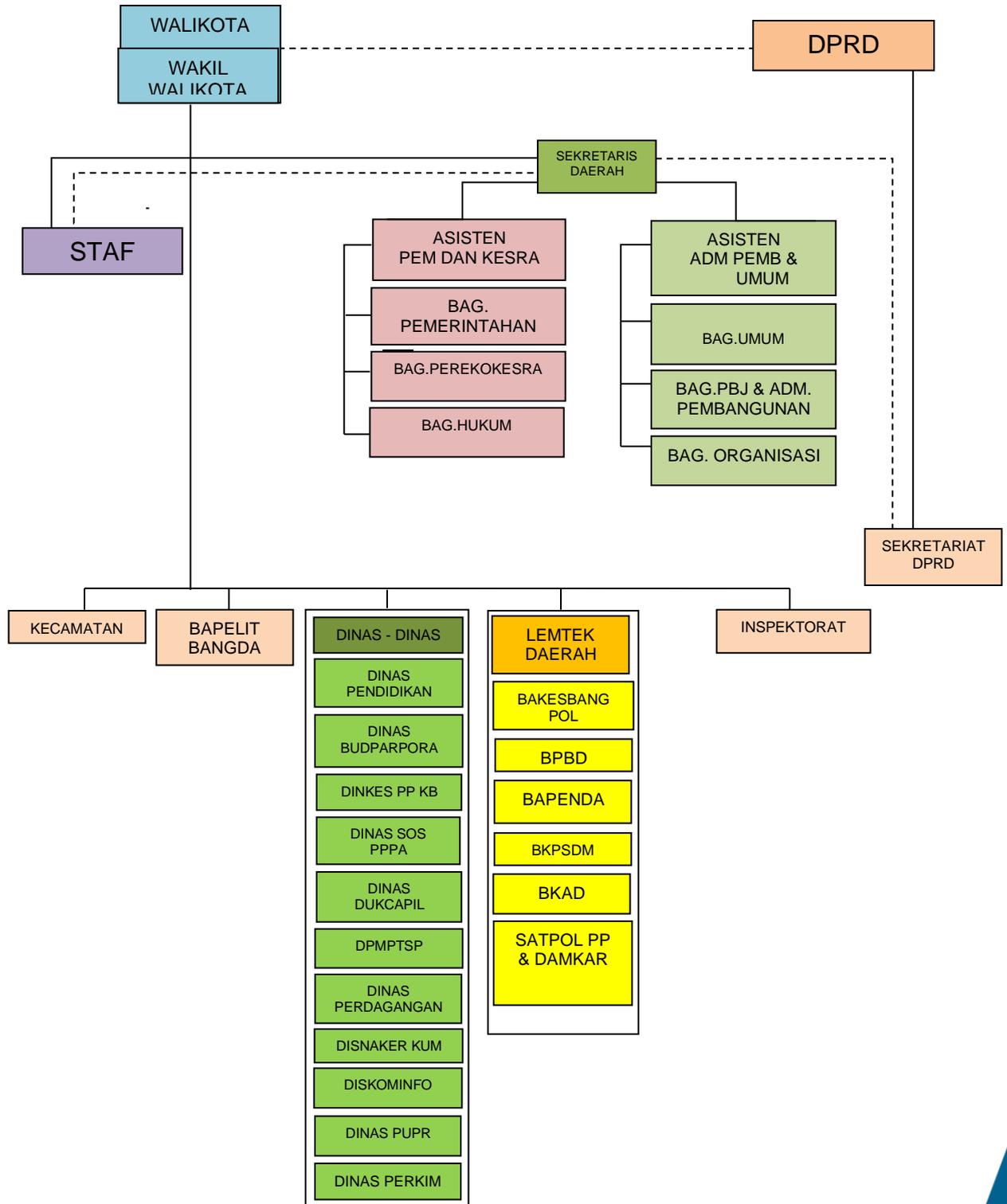
Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kota Madiun yang mengalami penurunan.

**Gambar I.9. Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**



**Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun**

### C. Struktur Organisasi



## B. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan, yaitu :

1. Masih perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia;
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan;
3. Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas dan mampu pulih secepatnya sebagai dampak Covid-19;
4. Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan
5. Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar I.10. Lima Masalah Pokok**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Indek Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan kualifikasi lulusan S1/S2/S3
			Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan
			Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
		Meningkatnya tingkat kemiskinan	Pandemic Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat
			Meningkatnya jumlah PMKS
		Masih terbatasnya jaring pengaman sosial	

## Pembangunan Kota Madiun



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)

Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu diidentifikasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah diidentifikasi. Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian IPM yang lambat meskipun IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan kemiskinan dan permasalahan kesehatan akibat Covid-19 perlu juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai investasi dan nilai tambah sektor unggulan, serta masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah. Berikut hasil pemetaan :

**Tabel I.11. Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih perlu peningkatan	Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Perencanaan pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan dan direncanakan secara komprehensif
			Masih terdapat jalan berkualitas buruk
			Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Proporsi Belanja modal relatif rendah meskipun mengalami peningkatan
			Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
		Masih terbatasnya pengelolaan lingkungan hidup	Penurunan kualitas lingkungan
			Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kota
			Pengelolaan limbah dan persampahan
			Sanitasi dan penyediaan air bersih
			Alih fungsi lahan pertanian
3	Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas	Menurunnya pertumbuhan ekonomi	Pandemic covid 19 masih belum pasti kapan akan diatasi
			Pembatasan mobilitas akibat Covid-19 dan menurunnya tingkat konsumsi
			Industri utama di Kota Madiun terdampak Covid-19 sehingga mengalami penurunan produksi
			Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
		Ketimpangan Pendapatan	Masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah
			Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan
		Kapasitas fiskal daerah terbatas	Masih terbatasnya penggalan potensi PAD
			Penentuan target pendapatan masih dalam skema pesimis

4	Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya belum optimal	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
		Masih perlu ditingkatkannya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis sistem informasi dan teknologi /digitalisasi	Masih terbatasnya kualitas ASN Kualitas pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan Masih terbatasnya kualitas aparatur Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemeritahan
5	Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat	Masih perlu ditingkatkannya harmonisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat	Masih terdapatnya kriminalitas Masih rawannya konflik sosial Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan serta masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman, keindahan)
		Masih rendahnya IPG dan IDG	Masih terbatasnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang yang terjadi dan akan terjadi termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka menengah.

Isu strategis dirumuskan dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam tabel di bawah. Setiap kriteria akan dikalikan dengan angka maksimum 100.

**Tabel I.12. Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
<b>Total</b>		100

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)

Dari berbagai isu startegis kemudian dikelompokan dan di ranking sebagai berikut :

**Tabel I.13. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun  
Tahun 2019-2024**

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
1	<b>Sumberdaya manusia</b>	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90	90	80	90	80	80	85,5	3
	Pencapaian SDGs									
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial									
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.									
2	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan	90	85	90	90	85	85	87,5	1
	Pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global									

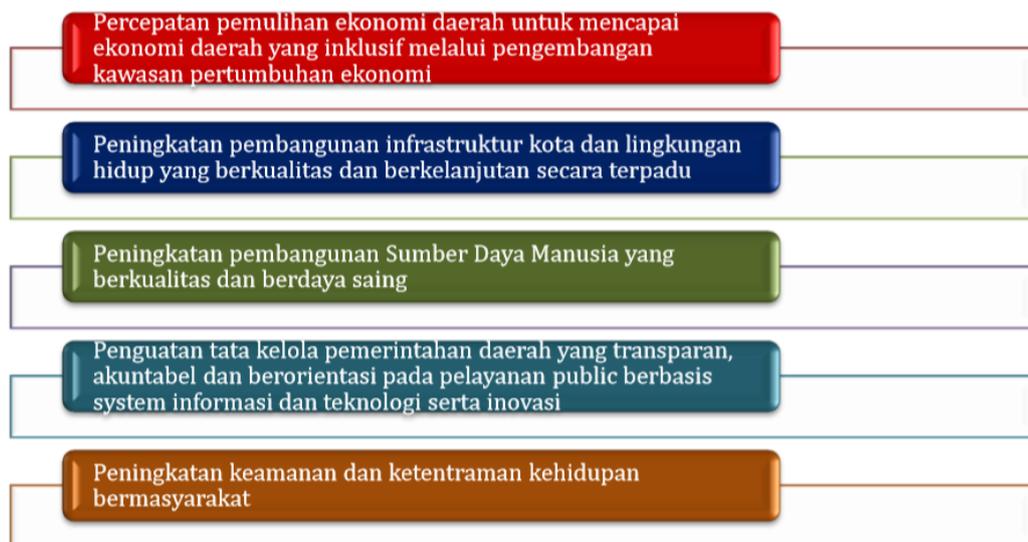
No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah	kawasan pertumbuhan ekonomi								
	Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan									
	Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal									
	Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru peran yang mandiri									
	Klasterisasi wilayah sesuai potensi sosial ekonomi									
	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri,									

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	pariwisata dan jasa produktif lainnya									
3	<b>Infrastruktur dan lingkungan</b>	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu								
	Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat									
	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat		90	85	90	85	85	85	86,5	2
	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air									
	Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup									
4	<b>Sosial kemasyarakatan</b>	Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat								
	Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup		85	90	80	85	80	85	84,5	5
	Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat									
5	<b>Pemerintahan dan Tata Kelola</b>	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan,								
	pembangunan berbasis Smart City		85	90	80	85	85	85	85,25	4

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.	akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi								
	Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional									

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun pelaksanaan rencana jangka menengah daerah 2019–2024 adalah sebagai berikut:

### Gambar I.12. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

### C. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2023, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB II**

# **P**ERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan

kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

#### **A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi Kota Madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2019–2024 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun dengan strategi **keberlanjutan** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan

(*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 2.1. RPJMD 2019-2024



Sumber : BAPPPEDA 2022

## 1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut di tetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera
RPJMD 2019-2024	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera

**Keterkaitan RPJPD  
dengan RPJMD****Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa  
Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui  
Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat  
Perdagangan dan Jasa Skala SWP**

Sumber : BAPPEDA 2022

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna "Kemajuan" berkaitan dengan kondisi yang terus- menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *good governance*.

Makna "Sejahtera" berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk

masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD**

<b>VISI :</b> <b>"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"</b>	
<b>M I S I</b>	<b>1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>
	<b>2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</b>
	<b>3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun</b>
	<b>4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>

Sumber : BAPPPEDA 2022

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan

dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

### 3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD**

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
1	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities
2	<b>Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</b>	Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun</b>	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

4	<b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif</li> <li>2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat</li> </ol>
---	--	---

**Tabel II.4 Target Kinerja Tujuan Akhir RPJMD**

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	69,26 (B)
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	90,33
Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,47
	Indeks Pembangunan Gender	94,57

Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,15
	Indek Gini	0,329

#### 4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD**

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cities			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2023
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (79)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06 (Baik) Indeks
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,55(baik) indeks
		Indeks Inovasi Daerah	58,4 indeks

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur		98,42 indeks
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		57,85 indeks

Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah		14,42 Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah		11,39 tahu
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup		72,83 Tahun
3.1.3	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender		77,20 indeks

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka		6,15%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		10,16
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa		11,32

Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2023
4.2.1	Pengurangan kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,77
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan social masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,46 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	76,27 indeks

## B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	BB (79) Skor
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06 (Baik) Indeks
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,55(baik) indeks

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemerintah Kota Madiun	
		Indeks Inovasi Daerah	58,4 indeks
3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	98,42 indeks
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,85 indeks
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,42 tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39 tahun
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83 tahun
7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,20 indeks
8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,15
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,16%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	11,32%
10	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,77%
11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,46 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	76,27 indeks

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	680,433,963,862
2	Program Pengelolaan Pendidikan	114,007,283,435
3	Program Pengembangan Kurikulum	4,807,339,116
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1,609,200,000
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,956,564,930
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	893,645,000
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	91,395,000

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,196,994,436
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7,157,271,500
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21,269,000
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	16,872,319,750
12	Program Penataan Bangunan Gedung	46,838,268,400
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12,877,487,200
14	Program Penyelenggaraan Jalan	34,139,050,650
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	986,419,000
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,075,860,000
17	Program Pengembangan Perumahan	2,477,810,500
18	Program Kawasan Permukiman	6,051,801,500
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	23,392,447,900
20	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11,032,938,311
21	Program Penanggulangan Bencana	1,396,582,000
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,123,228,000
23	Program Pemberdayaan Sosial	3,826,778,450
24	Program Rehabilitasi Sosial	2,981,665,743
25	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	12,167,195,900
26	Program Penanganan Bencana	656,991,300
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	182,250,086
28	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,093,811,800
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	170,900,000
30	Program Hubungan Industrial	2,177,271,897
31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,090,047,400
32	Program Perlindungan Perempuan	240,370,350
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	271,270,300
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	108,891,900
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	264,553,110
36	Program Perlindungan Khusus Anak	82,817,640
37	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	503,271,500
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	78,393,500
39	Program Pengelolaan Izin Lokasi	15,000,000

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
40	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	36,200,000
41	Program Penatagunaan Tanah	263,400,000
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	299,284,000
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,110,568,770
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	76,700,000
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	51,985,000
46	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	323,629,200
47	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	672,265,000
48	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	145,000,000
49	Program Pengelolaan Persampahan	6,184,615,336
50	Program Pendaftaran Penduduk	187,143,864
51	Program Pencatatan Sipil	172,282,982
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	215,242,891
53	Program Pengendalian Penduduk	704,621,300
54	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,674,264,000
55	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,788,406,800
56	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7,739,534,952
57	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4,005,319,361
58	Program Aplikasi Informatika	19,666,506,560
59	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	460,790,000
60	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	180,804,100
61	Program Pengembangan UMKM	202,295,406
62	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	34,700,000
63	Program Promosi Penanaman Modal	308,848,200
64	Program Pelayanan Penanaman Modal	798,175,500
65	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	462,675,000
66	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	198,248,500
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	475,000,000

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7,493,389,861
69	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125,000,000
70	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	292,872,000
71	Program Pengembangan Kebudayaan	1,892,700,000
72	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	50,000,000
73	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50,000,000
74	Program Pembinaan Perpustakaan	1,015,899,000
75	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	128,037,656
76	Program Pengelolaan Arsip	705,708,673
77	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	162,762,100
78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	186,241,000
79	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	34,510,000
80	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	183,754,000
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	437,660,866
82	Program Pemasaran Pariwisata	1,140,786,000
83	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	278,000,000
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,269,957,000
85	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	439,684,000
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	337,591,000
87	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	167,855,000
88	Program Perizinan Usaha Pertanian	33,600,000
89	Program Penyuluhan Pertanian	2,086,055,300
90	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	267,374,400
91	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4,373,887,270
92	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	250,257,000
93	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235,684,724
94	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	309,031,550
95	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2,090,592,950

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
96	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	374,720,438
97	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-
98	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16,094,488,817
99	Program Perekonomian Dan Pembangunan	839,742,822
100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	16,823,981,365
101	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,732,090,550
102	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,357,785,500
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6,243,033,642
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,149,948,000
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,326,995,292
106	Program Kepegawaian Daerah	2,073,107,400
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,459,306,900
108	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,344,069,542
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	368,115,900
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	911,851,800
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16,460,529,829
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16,340,240,993
113	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2,893,518,500
114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	391,873,300
115	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	359,150,297
116	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	12,016,837,530
117	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	185,337,000
118	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	671,581,250
119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,781,976,750
<b>JUMLAH</b>		<b>1,280,060,781,955</b>

**BAB  
III****A KUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actualizing dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

## A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 bahwa kategori capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran**

No	Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja	Bobot	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Sangat Baik/Istimewa	5	Di atas ekspektasi
2	100 %	Baik	4	Sesuai ekspektasi
3	80 % ≤ 99 %	Cukup	3	Di bawah ekspektasi
4	60 % ≤ 79 %	Kurang	2	
5	0 % ≤ 59 %	Sangat Kurang	1	

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## 2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

**Realisasi capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikaitkan dengan Misi Walikota dan Tujuan pendukung Misi Walikota adalah sebagai berikut :**

**Tabel III.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Misi 2023**

<b>Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	69,26 (B)	87,95 (A-)	126,98

**Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	90,33	91,93	101,77

**Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,47	83,71	101,50
	Indeks Pembangunan Gender	94,57	94,57*	100,14

**Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,89	6,87**	-
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,15	82,88	107,42
	Indek Gini	0,329	0,416	73,56

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun, KEMENPANRB dan BPS

\*Angka 2021 dikarenakan angka 2022 dan 2023 belum rilis

**Tabel III.3 Pengukuran Realisasi Kinerja 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	BB (79) Skor	A (80,08)	101,37
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	3,217	-
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06 (Baik) Indeks	4,45 (Memuaskan) indeks	145,42
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,55(baik) indeks	88,028 (sangat baik)	101,70
		Indeks Inovasi Daerah	58,4 indeks	52,62 indeks	90,10
3.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,42 indeks	98,44	100,02
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,85 indeks	60,32	104,26
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,42 tahun	14,44	100,14
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39 tahun	11,82 tahun	103,77
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83 tahun	73,44	100,83

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,20 indeks	78.03*	101,07*
8.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,15	5,85	104,88
9.	Meningkatnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,16	5,60	55,11
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	11,32	24,7	218,19
10.	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,77	4,74	100,63
11.	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Angka Kerukunan	B skor 74,46 (harmonis)	77,80 (harmonis)	104,48
		Indeks Rasa Aman	76,27	82,47	108,12

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber Data : Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah

### 3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

**1. Misi Pertama : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran**

**Pada Misi 1 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :**

**Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2022 (n-1)	2023 (n)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	<b>70,01 (BB)</b>	69,26 (B)	87,95 (A-)

Sumber : KEMENPANRB 2023

**Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	87,95 (A-)	125,62

Sumber : KEMENPANRB 2023

**Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi 2023	Realisasi Nasional 2023
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	87,95 (A-)	BB	N/A

Sumber : KEMENPANRB 2023

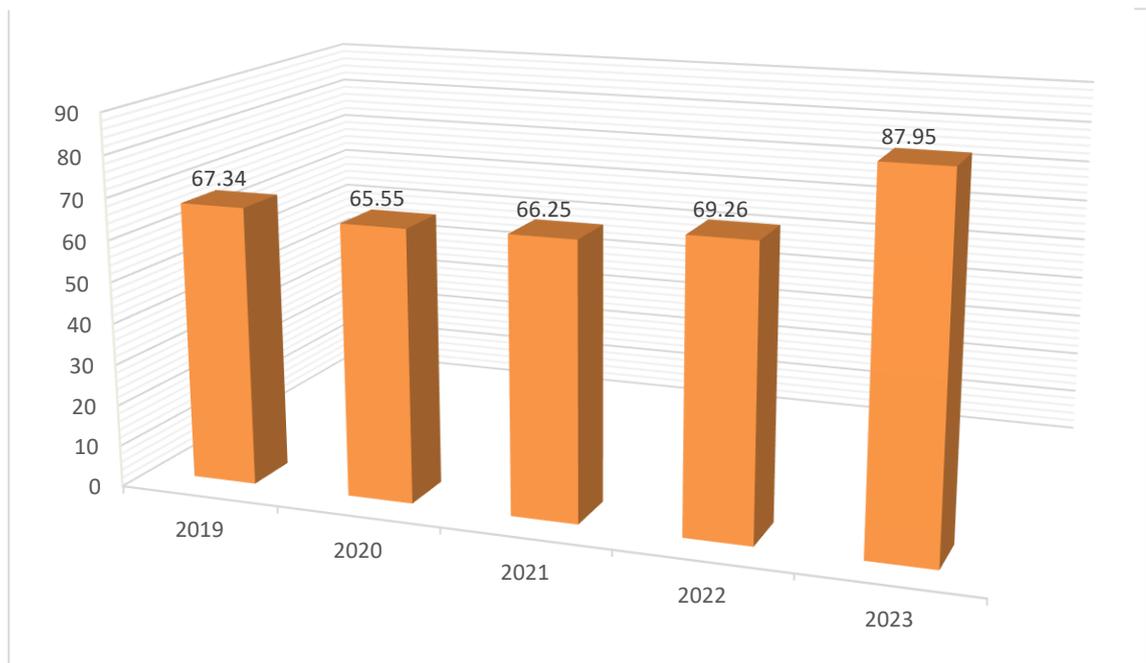
### Indeks RB Kota Madiun

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2023**



Sumber : Kementerian PANRB 2023

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam komposisi penilaiannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 87,95 kategori "A-" dengan capaian kinerja sebesar 129,33%.

Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel III.7. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023**

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	74,34
B.	RB Tematik	20	13,61
C.	Indeks RB	120	87,95
			A-

Sumber : Kementerian PANRB 2023

Sedangkan untuk rincian hasil dari masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

**Tabel. III.8. Rincian Hasil Indikator Penilaian dari Kementerian/Lembaga**

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,33	2,33	Tim Penilai Nasional
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	86,78	4,72	Tim Penilai Nasional
3.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	KEMENDAGRI
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8	KEMENPAN RB
5.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,252	2,6	BPKP
6.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	0,5	KEMENPAN RB
7.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	80,08	3,2	KEMENPAN RB
8.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,5	KEMENPAN RB

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
9.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	72,33	1,81	ANRI
10.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	5	2,5	KEMENPAN RB
11.	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	50	1,25	LAN
12.	Indeks Reformasi Hukum	2,5	76,23	1,91	KEMENKUM HAM
13.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,88	1,44	BPS
14.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	73,65	1,84	LKPP
15.	Indeks Sistem Merit	4	287,5	2,8	KASN
16.	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,43	1,33	KEMENPAN RB
17.	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	1,5	1,4	Ombudsman RI
18.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	4,45	8,01	KEMENPAN RB
19.	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2	Tim Penilai Nasional
20.	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	76,47	4,9	Tim Penilai Nasional
21.	Opini BPK	5	5	5	BPK
22.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	93,6	3,74	BPK
23.	Indeks BerAKHLAK	4	63	2,52	KEMENPAN RB
24.	Survei Penilaian Integritas	10	81,86	8,19	KPK
25.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,13	7,05	KEMENPAN RB
26.	Koefisien	10	0	0	Tim Penilai Nasional
27.	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,32	0,32	Tim Penilai Nasional
28.	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,2	0,2	Tim Penilai Nasional
29.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,23	0,23	Tim Penilai Nasional
30.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4	Tim Penilai Nasional
31.	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,17	0,17	Tim Penilai Nasional
32.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	100	0,48	Tim Penilai Nasional

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor 2023	Skor 2023	Sumber Data
33.	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	100	0,3	Tim Penilai Nasional
34.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	71,03	0,25	Tim Penilai Nasional
35.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	86,4	0,52	Tim Penilai Nasional
36.	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	66,67	0,17	Tim Penilai Nasional
37.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,53	1,53	Tim Penilai Nasional
38.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,53	1,53	Tim Penilai Nasional
39.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2,56	2,56	Tim Penilai Nasional
40.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,96	2,96	Tim Penilai Nasional
41.	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1,99	1,99	Tim Penilai Nasional

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2023

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 sehingga memberikan konsep yang jelas terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun
2. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
3. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
4. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan
5. Dukungan budaya kinerja mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah

6. Ketersediaan aplikasi yang terintegrasi
7. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
8. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Penetapan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dengan arah penerapan RB berdampak yang menyebabkan perubahan pada implementasi RB di Pemerintah Kota Madiun
2. Penetapan kebijakan pemberlakuan sistem kerja yang berdampak pada perubahan kebijakan dan penyesuaian sistem kerja
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
4. Terdapat beberapa indikator general baru yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga
5. Belum optimalnya harmonisasi Raperda dan Raperkada
6. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap SOP Unit Pelayanan
8. Belum optimalnya pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Penetapan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi, melaksanakan penyetaraan jabatan serta melaksanakan penyesuaian sistem kerja
2. Penetapan peraturan Walikota Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Kerja
3. Melaksanakan bimtek mengenai pohon kinerja/cascading pada bulan Juni 2024 dalam rangka peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah

4. Melaksanakan bimtek mengenai SPIP pada bulan Juni 2024
5. Melaksanakan upaya-upaya erbaikan menajeen resiko yaitu:
  - bimtek mengenai MRI pada bulan Februari 2024
  - menyusun rancangan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah pada bulan
  - menyusun revisi pedoman pengelolaan risiko pada bulan April 2024
6. Melaksanakan bimtek mengenai MRI Fraud dan kegiatan pencegahan, deteksi dan pemeriksaan pada bulan Februari 2024
7. Melakukan asistensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada
8. Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Raperda dan Raperkada
9. Melakukan review, dan evaluasi dilaksanakan tiap semester terkait penyelenggaraan statistik sektoral
10. Mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional Pengelola PBJ ke BKPSDM Kota Madiun: Usulan kebutuhan fungsional Pengelola PBJ tahun 2024 sebanyak 2 orang. ABK 8 orang, dan keterisian PNS eksisting 6 orang. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan indeks tata kelola pengadaan
11. Pemetaan kompetensi (Assessment) telah dilaksanakan bertahap untuk pegawai mulai dari jenjang JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana. Dan diperbarui secara berkala apabila telah melebihi masa 3 tahun hasil Assessment nya.
12. Pemetaan talenta saat ini telah dalam proses penyusunan bagi pegawai yang telah memiliki hasil Assessment
13. Melakukan pengawasan atas kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas dan Kemudahan untuk mengikuti SOP pada OPD Pelayanan
14. Melaksanakan pengawasan thd obyektifitas Kebijakan Manajemen SDM
15. Mengoptimalkan sosialisasi pencegahan korupsi (gratifikasi, benturan kepentingan dsb)
16. Melaksanakan pengawasan ketaatan dan kinerja
17. Melaksanakan Reviu Pengelolaan UKPB dan Probitiy Audit

18. Maksanakan perbaikan/revisi peraturan dan aplikasi WBS
19. Melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten dan memberikan feed back terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan

**Tujuan “Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator dengan capaian sebagai berikut :**

**Tabel. III.10. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 1 Tahun 2023**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (79) Skor	A (80,08)	101,37
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat tinggi	2,98	-
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06	4,45 (memuaskan) indeks	145,42
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86,55	88,028 (baik)	101,70
		Indeks Inovasi Daerah	58,4	52,62	90,10

Sumber Data : Kementerian PAN RB, Dinas terkait pengampu indikator dan BPS

#### **A. Sasaran 1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah :**

##### *1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11. Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80 - 90	<b>Memuaskan</b> , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4.	B	>60 -70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5.	CC	>50 -60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>50 -60	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>50 -60	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

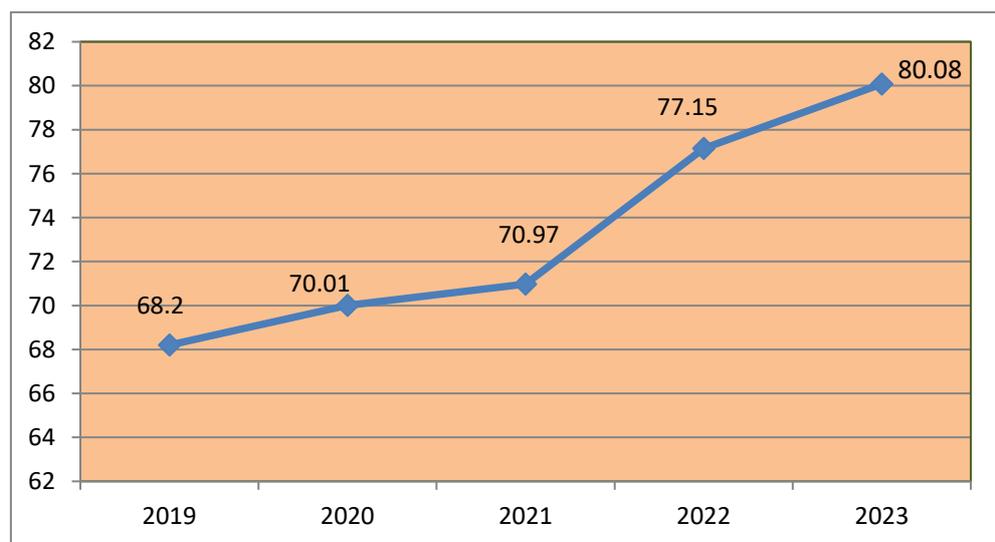
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar III.3. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2023**

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,67
2	Pengukuran Kinerja	30	23,89
3	Pelaporan Kinerja	15	12,44
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,08
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>80,08</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

**Gambar III.4. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2023**



Sumber : KEMENPANRB 2023

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 27 November 2023 Nomor : B/397/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 80,08 dengan dengan Predikat A tercapai 101,36% dari target sebesar 79. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Namun hasil evaluasi mulai tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pohon kinerja 2023 berdasarkan isu strategis oleh perangkat daerah melalui aplikasi E-KAK yang nantinya akan ditarik menjadi Perjanjian Kinerja dan SKP pada aplikasi M-SKP. Pohon kinerja ini kemudian sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan melalui berita acara penyesuaian dokumen perencanaan dengan pohon kinerja
2. Melakukan *collaborative working* yang digambarkan dalam pohon kinerja tingkat Kota Madiun
3. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana yang selaras dengan pohon kinerja dan penandatanganan Perjanjian Kinerja

4. Menyusun manual sistematika penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah yang menjelaskan perencanaan berdasarkan laporan kinerja tahun N-1 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya
5. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dilaporkan Tahun 2023, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
6. Pemanfaatan informasi kinerja melalui aplikasi yang terintegrasi dengan kualitas pengukuran kinerja yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yaitu melalui dashboard manajemen kinerja
7. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro Organisasi, dan study banding
8. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan ashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

## 2. *Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan

tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Nilai EKPPD Tahun 2022 terhadap hasil LPPD tahun sebelumnya diumumkan terakhir kali pada tahun 2020, maka pada tahun 2021 dan 2022 data yang disajikan masih menggunakan data tahun 2020. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator, sebagai berikut :

**Tabel III.12 Tabel pembobotan Indikator Kinerja Makro  
Penyelenggaraan Pemerintahan**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	BOBOT INDIKATOR
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran (TPT)	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :

**Tabel III.13 Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH INDIKATOR
1	IKK Outcome	105
2	IKK Output	473
3	IKK Fungsi Penunjang	19

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 meraih nilai 3,3850 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,3056. Sedangkan di Tahun 2021 dan 2022 tidak dikeluarkan nilai LPPD dari Kementerian Dalam Negeri karena perubahan sistem dari penilaian secara manual menjadi penilaian melalui aplikasi serta masih adanya pandemi COVID-19 yang mana di seluruh wilayahan Indonesia juga tidak keluar nilai LPPD.

Adapun Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.14. Tabel Nilai LPPD tahun 2019-2023**

Tahun	Nilai (Status Kinerja)
2019	3,3056 (sangat tinggi)
2020	3,385
2021	Tidak keluar nilai
2022	Tidak keluar nilai
2023	2,98 (sedang)

*Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun*

*\*Data Tahun 2021 dan 2022 data tidak dikeluarkan*

Faktor Penghambat pencapaian realisasi indikator LPPD yaitu adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara penyusun LPPD dengan Tim APIP Inspektorat menyebabkan progres penyusunan LPPD belum secepat yang diharapkan.

Sedangkan faktor pendorong pencapaian realisasi indikator LPPD yaitu kemudahan dan kecepatan setiap perangkat daerah penyusun LPPD untuk mengumpulkan data dukung melalui fasilitas *Google Drive* serta koordinasi yang intens dengan perangkat daerah penyusun LPPD dapat meminimalisir kesalahan input data.

Rencana tindak lanjut atas capaian realisasi indikator LPPD:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antara perangkat daerah penyusun LPPD, APIP Inspektorat dan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Menyebarluaskan juknis dan definisi operasional setiap IKK LPPD kepada Perangkat Daerah APIP Inspektorat
3. Melaksanakan Bimtek/Desk Pendalaman dan Pemahaman IKK dengan narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri yang melibatkan Perangkat Daerah penyusun LPPD dan APIP Inspektorat untuk penyamaan persepsi tentang IKK LPPD.

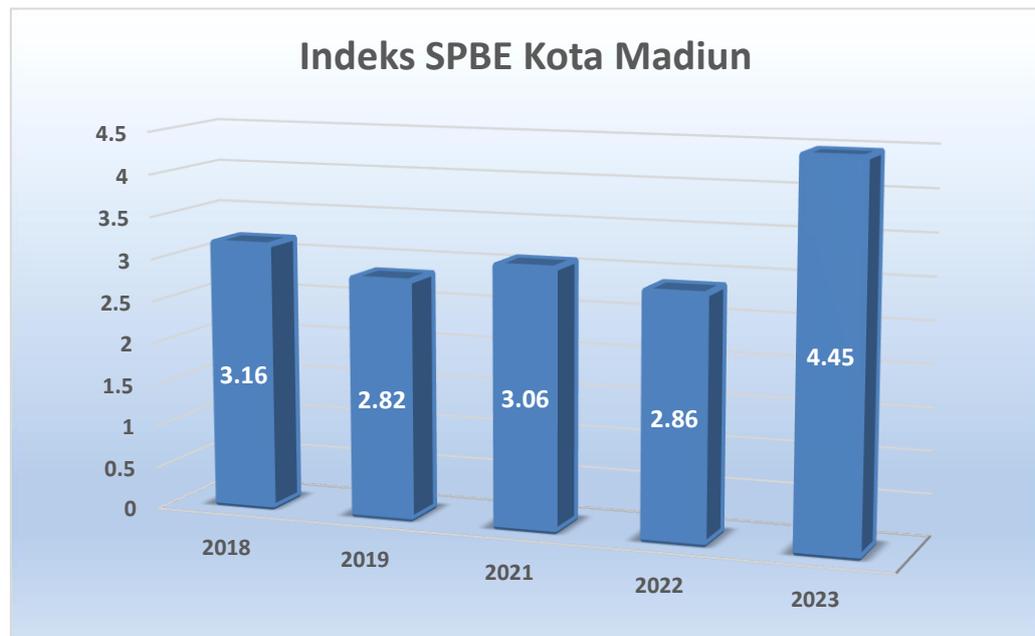
### 3. *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada

instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

**Gambar III.5. Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun**



*Sumber : Kementerian PAN RB*

Proses Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia telah dilaksanakan dan Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 4,45 dengan predikat Memuaskan. Nilai ini naik drastis jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang memperoleh nilai 2,86 (Baik). Sedangkan di Tahun 2021 yang memperoleh nilai 3,06 (baik) dan Tahun 2019 memperoleh nilai 2,82 (Baik). Naik - turunnya indeks SPBE tersebut disebabkan adanya perbedaan sistem pengukuran, penilaian, dan evaluasi SPBE, hal ini dilakukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk

meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
2. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
3. Adanya Peraturan Wali Kota tentang arsitektur dan peta rencana SPBE yang dapat digunakan sebagai panduan
4. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
5. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
6. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai.

Faktor Penghambat :

1. Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal
2. Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh)
3. Audit internal TIK yang belum optimal

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Membuat regulasi kebijakan turunan SPBE
2. Membuat narasi dan bukti dukung secara lengkap per level dalam setiap indikator SPBE dengan mengacu pedoman Permenpan RB 6/2023 tentang tata cara tauval SPBE
3. Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur

4. Mereviu dokumen kebijakan yang sudah ada
5. Memasukkan Dinas Kominfo menjadi anggota TAPD
6. Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional
7. Melaksanakan audit internal TIK
8. Menggunakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh pusat
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur TIK
10. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

Analisis terhadap ketercapaian dan ketidaktercapaian:

Disamping faktor pendorong dan faktor penghambat dari ketercapaian dan tidak ketercapaian di atas, dari hasil evaluasi SPBE 5 tahun terakhir, ada juga faktor sistematika evaluasi dan penilaian yang tidak sama setiap tahunnya yang menyebabkan nilai SPBE setiap tahunnya bisa naik – turun.

## **B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik :\***

### *1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun*

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 85 disesuaikan menjadi 86,55. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi capaian kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan hasil survey tahun 2023 pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 88,028 dengan kategori nilai Baik, hal ini menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2022 dengan nilai sebesar 86,964 dengan capaian kinerja atas target di tahun 2023 sebesar 101,70%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 86,55 dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Kenaikan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
2. Kolaborasi kinerja antar perangkat daerah di Pemerintah Kota Madiun
3. Pelayanan online

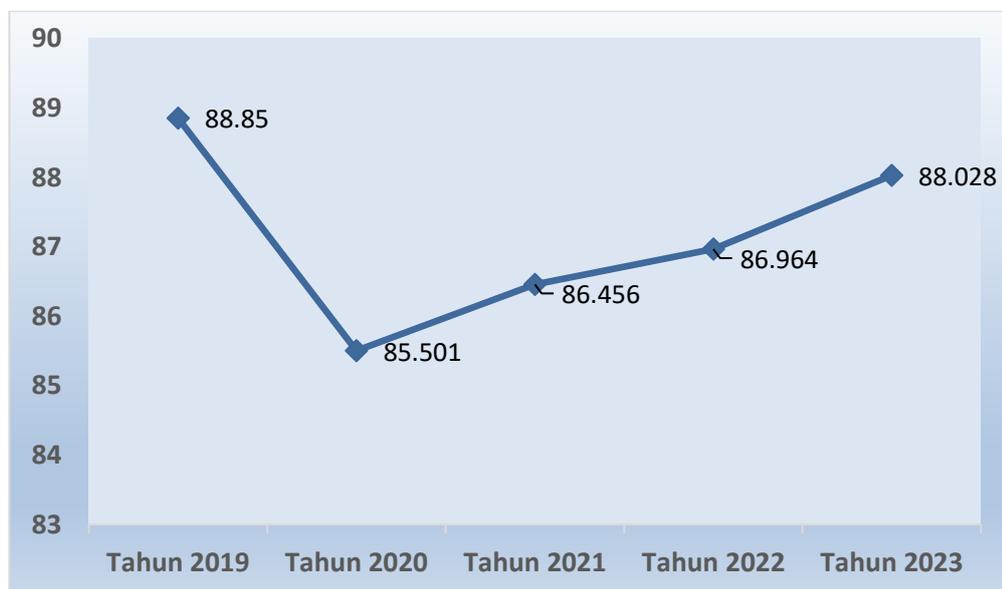
4. Inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada penerima layanan
5. Sistem dan prosedur kerja yang memadai

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya :

1. Terdapat beberapa penyelenggara pelayanan dengan sarana dan prasaranya yang belum memadai
2. Masih terdapat oknum petugas berperilaku kurang baik dalam memberikan pelayanan
3. Masih terdapat beberapa penyelenggara pelayanan yang belum menerapkan standar pelayanan secara optimal

Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.6. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun**



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun (2023)

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan sistem pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara online. Sedangkan pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal.

Pemerintah Kota Madiun selalu berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur maupun Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Pelayanan Publik secara berkala dan berkelanjutan
6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat

8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2023 dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

## 2. Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah.

*Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari :

- Sangat Inovatif;
- Inovatif;
- Kurang Inovatif; serta
- Tidak Dapat Dinilai.

IGA (*Innovative Government Award*) Kemendagri dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan *Innovative Government Award* / IGA Kemendagri adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai

2. Mendorong penerapan *good governance*
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

Output dari IGA adalah keluarnya Indeks Inovasi Daerah yang merupakan sarana dari pemerintah pusat untuk menilai kualitas dan kuantitas inovasi pada pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 proposal inovasi yang diinput dan dilaporkan melalui <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> adalah sebanyak 135 proposal. Adapun rinciannya adalah:

1. 122 adalah inovasi yang telah diterapkan
2. 11 inovasi yang masuk tahap uji coba
3. 2 proposal inovasi baru

Berdasarkan penilaian di SIM IGA, Kota Madiun mendapatkan indeks 71,82 atau terkategori sebagai Kota Terinovatif, namun demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 hanya mendapatkan 52,62.

Perbedaan hasil penilaian ini dikarenakan setelah verval oleh tim penilai Kemendagri didapati:

1. Data dukung yang diajukan pada indikator jumlah rekomendasi kebijakan (aspek Satuan Pemerintah Daerah/ SPD) dianggap kurang tepat karena hanya mencantumkan informasi dari media pemberitaan terkait kebijakan kepala daerah tanpa ada informasi legal ataupun dokumen pendukung seperti : Peraturan/ Keputusan Walikota terkait kebijakan inovasi dan / atau Dokumen Kajian/ Penelitian

2. Dari 135 laporan proposal inovasi tersebut, hanya 65 laporan proposal yang bisa dinilai karena merupakan inovasi yang dilaksanakan/ diterapkan sejak 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022, sedangkan sisanya yakni 70 proposal inovasi lainnya terkategori inovasi yang tidak bisa dinilai karena :
  - a. 60 laporan inovasi adalah inovasi yang diterapkan di tahun 2023
  - b. 10 laporan inovasi data dukungnya tidak lengkap
  - c. Proposal inovasi yang dilaporkan/diinput di sistem ditolak/direject oleh tim Kemendagri karena informasi yang disampaikan kurang *update* lengkap, semisal : Inovasi telah dilakukan sejak tahun 2021 ke bawah (2020, 2019, dst) dan dilaporkan inovasi tersebut telah dilakukan update penerapannya per 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022, tapi informasi kebaruan terkait inovasi tersebut tidak disampaikan pada proposal inovasi yang dilaporkan. Adapun inovasi yang di-input pada pelaporan melalui sim IGA 2023 adalah laporan inovasi yang *cut off*-nya adalah per 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022, sehingga inovasi yang dilaksanakan sebelum 1 Januari 2021 harus ada informasi kebaruan pada inovasi tersebut
  - d. Data dukung yang disampaikan/ diajukan pada banyak indikator Satuan Inovasi Daerah/ SID (21 indikator) dianggap tidak sesuai dengan substansi/ kandungan inovasi yang dilaporkan sehingga dari penilaian atas indikator- indikator tersebut ada yang diturunkan nilainya bahkan tidak dinilai

Selain daripada unsur penilaian diatas, faktor – faktor yang dapat dianggap sebagai penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian indeks inovasi daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. SDM yang menangani inovasi sering berubah person/ pelaksananya, semisal: yang diundang dan seharusnya datang pada rapat/ pertemuan/ desk adalah inovator, tapi ternyata yang datang pada acara tersebut adalah *person*/ pihak lain yang tidak menangani inovasi yang hendak dilaporkan

- b. Kurangnya pemahaman akan pendeskripsian/ penyusunan narasi inovasi beserta data dukungnya dari pihak inovator/ *person* yang datang (diberikan tugas untuk meng-input data inovasi oleh Perangkat Daerah asal)
- c. Kurang optimalnya pelaporan inovasi dari Perangkat Daerah, hanya ada 22 Perangkat Daerah dan 1 Bagian yang mengirimkan laporan inovasinya
- d. Perbedaan standar penilaian dari tim penilai (Kemendagri), karena pasca pertemuan IGA 2023 yang menghadirkan pihak Kemendagri sudah ditindaklanjuti dengan data dukung indikator sebagaimana diminta, namun dalam verval oleh tim Kemendagri yang juga melibatkan pihak ke-3 (akademisi), data dukung tersebut dianggap kurang relevan

Sedangkan untuk faktor pendorong yang bisa menjadi modal pencapaian target ke depan adalah:

- a. Iklim berinovasi yang mulai terbangun khususnya pada Perangkat Daerah yang bersinggungan dengan layanan publik, hal ini selain karena tuntutan masyarakat juga dikarenakan adanya fasilitasi lomba inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Bagian Organisasi
- b. Antusiasme dari para peserta/ inovator setelah memahami adanya berbagai fasilitasi lomba inovasi yang ada, seperti : KOVABLIK, KIAT, INOTEK, dsb
- c. Sarana prasarana pendukung yang memadai

Dan guna menyikapi permasalahan/ faktor penghambat tersebut serta mengambil peluang dari faktor pendorong yang ada, maka pada tahun 2024 ke depan akan dilaksanakan upaya yang lebih intensif lagi guna mendorong pencapaian target Indeks Inovasi Daerah, seperti:

- a. Mendatangkan narasumber Kemendagri maupun pihak lain dari Pusat yang betul- betul memahami substansi dan cara penyusunan proposal inovasi dan data dukung indikatornya

- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kemendagri selaku penilai dan para inovator di Perangkat Daerah sehingga didapatkan kesepakatan dan pemahaman akan proposal inovasi yang dilaporkan
- c. Meningkatkan semangat berinovasi Perangkat Daerah melalui fasilitasi Kompetisi Inovasi Kota Madiun dan fasilitasi lomba Inovasi Teknologi Provinsi Jawa Timur

## 2. Misi Kedua : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Pada Misi 2 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2022 (n-1)	2023 (n)
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	<b>89,01</b>	90,33	91,93

Sumber : KEMENPANRB 2023

**Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	89,01	91,93	103,28

Sumber : KEMENPANRB 2023

**Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi 2023	Realisasi Nasional 2023
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	91,93	N/A	N/A

Sumber : KEMENPANRB 2023

### Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti

kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep *livable city* terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang *livable*.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep *livable city* bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat *livability* di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan *livable* dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar livable city :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Indikator Umum

I. Sarana Prasarana

1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
2. Kualitas Angkutan/ Transportasi
3. Kondisi Jalan
4. Pedestrian
5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
9. Listrik
10. Ketersediaan Air Bersih
11. Kualitas Air Bersih
12. Telekomunikasi

II. Ekonomi

1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
2. Biaya Hidup

III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan

1. Tata Kota
2. RTH
3. Kebersihan

4. Persampahan
  5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air
- IV. Kehidupan Sosial
1. Kriminalitas
  2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
  3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
  4. Akses Informasi Pelayanan Publik
  5. Keamanan

### **Indikator Khusus**

- I. Sarana Prasarana
  1. Kantong Parkir
  2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)
  3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
  4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
  5. Jaringan Internet (WIFI)
- II. Ekonomi
  1. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah
- III. Kehidupan Sosial
  1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama
  2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
  3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
  4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
  5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif
- IV. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum
- V. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan
- VI. Kondisi Politik
- VII. Smart City

## VIII. Kualitas Hidup Penduduk

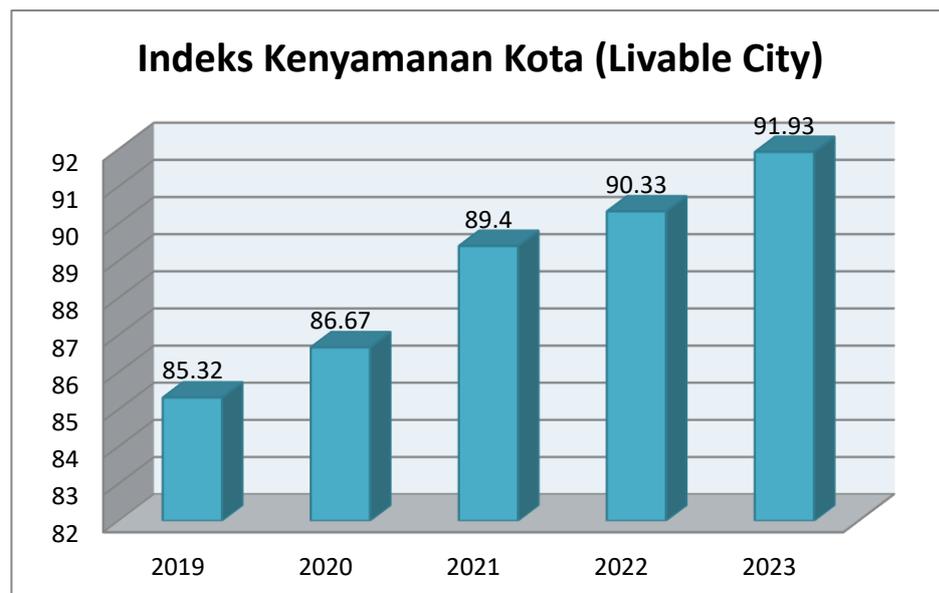
Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*) adalah indikator untuk mengukur seberapa nyaman Kota Madiun dilihat dari:

1. Infrastruktur pendukung meliputi: akses jalan, akses air minum dan akses sanitasi perumahan
2. Sarana prasarana pemukiman meliputi: rumah layak huni, rumah tinggal bersanitasi, cakupan lingkungan yang sehat yang didukung dengan PSU, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan fasilitas permakaman
3. Keamanan meliputi: persepsi keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan dan keamanan dari kekerasan.

Dari perhitungan indeks kenyamanan kota diperoleh dari masing-masing indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indeks infrastruktur diperoleh nilai (98,44)
2. Indeks sarana dan prasarana permukiman diperoleh nilai (94,05)
3. Indeks rasa aman diperoleh nilai (82,47)

**Gambar III.7. Trend Kenaikan Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)  
Tahun 2019-2023**



Sumber : BAPPPEDA Kota Madiun

Realisasi kinerja Indeks Livable City Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 91,93 dengan target 90,33. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,77%. Sedangkan di tahun 2022 realisasinya sebesar 90,33. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tujuan “Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”** didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel. III.16. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 2 Tahun 2023**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur	98,42	98,44	100,02
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,85	60,32	104,26

*Sumber Data : BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun*

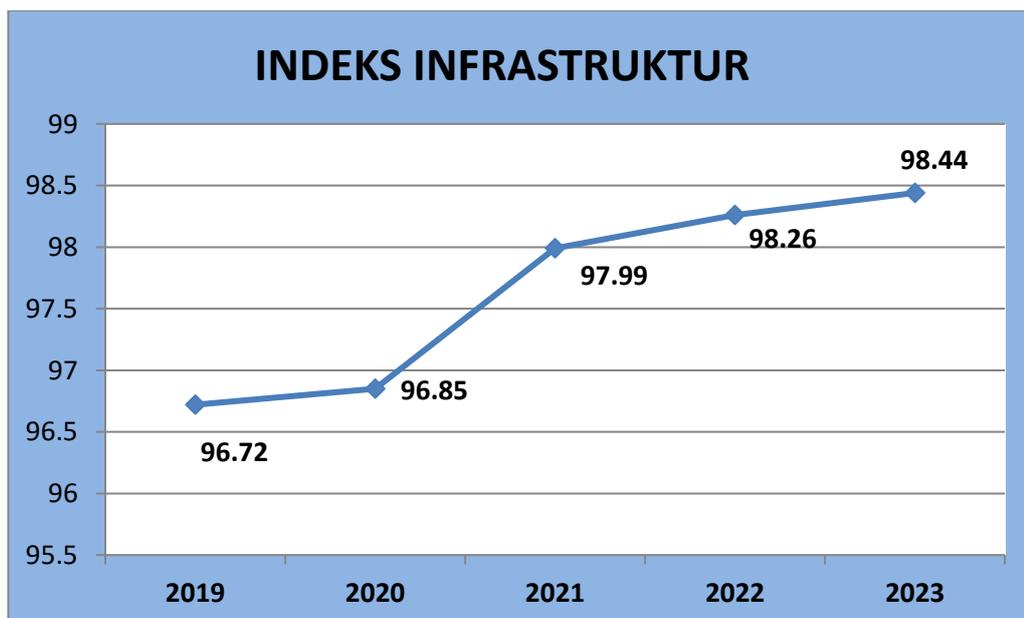
#### **A. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur Kota :**

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan

akses terhadap sanitasi layak (limbah domestik dan sampah), persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh capaian indeks infrastruktur Kota Madiun yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 realisasinya adalah 98,26 dengan capaian kinerja sebesar 100,01%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2022 yaitu 98,25 dengan realisasi kinerja sebesar 98,26. Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi kinerjanya sebesar 98,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,02.

**Gambar III.8. Trend Kenaikan Indeks Infrastruktur  
Tahun 2019-2023**



Sumber Data : BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong sebagai berikut:

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif

- 2) Adanya aplikasi yang memudahhi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompoten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak
- 3) Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan secara bertahap

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan Indeks Infrastruktur :

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
- 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.

- 4) Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibat intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur. Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

### **B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan lahan yang diinput dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/>.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2023 sebesar 60,32. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Capaian IKA Tahun 2023 yaitu 51,43, IKU Tahun 2023 yaitu 87,94 sedangkan IKL Tahun 2023 yaitu 24,16.

Adapun kriteria dalam penilaian IKLH adalah sebagai berikut :

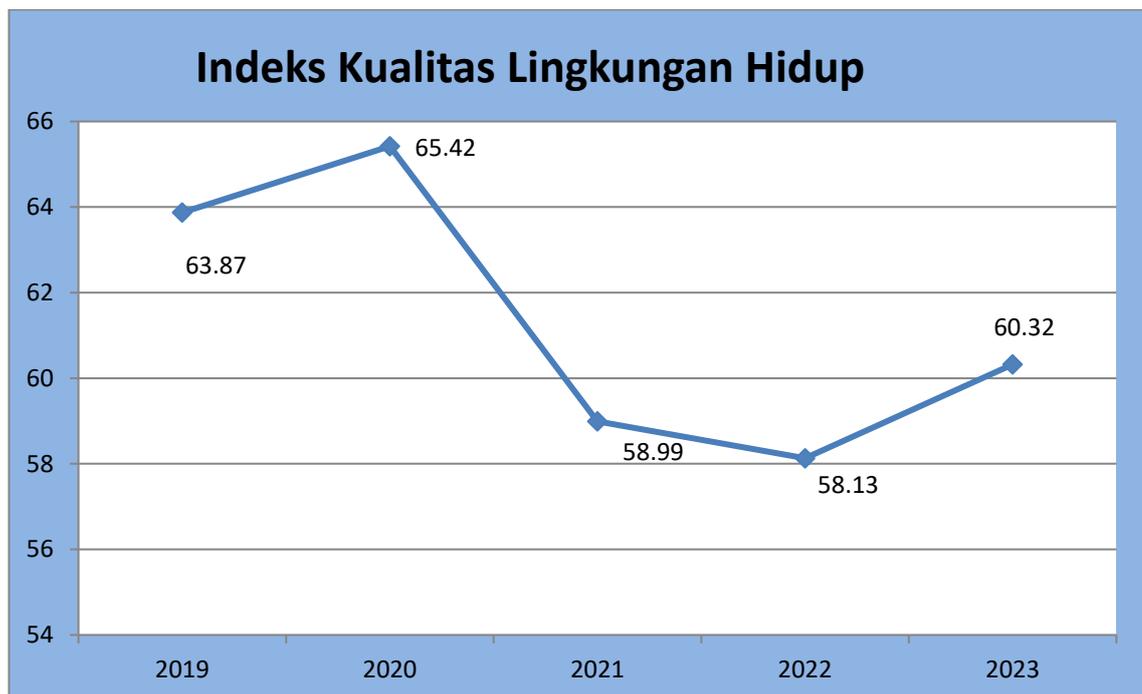
SKOR	KRITERIA
------	----------

$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Berikut adalah data realisasi IKLH dalam 5 tahun terakhir

**Gambar III.9. Trend Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Tahun 2019-2023**



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2022 yaitu 58,13 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2023 adalah 60,32, sehingga

apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2023 berada dalam posisi "sedang". Diharapkan setiap tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun. Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

1. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
2. Penambahan RTH yang tertutup penghijauan sebagai penunjang peningkatan indeks kualitas lahan

Faktor penghambat yang mempengaruhi yaitu :

1. Masuknya sumber pencemar pada badan air penerima yang berasal dari luar Kota Madiun berpotensi memberi kontribusi penurunan kualitas air
2. Penambahan jumlah kendaraan bermotor berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara
3. Sejak awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Kota Madiun terdapat banyak kegiatan pembaruan struktur yang menyebabkan adanya penebangan pohon di tepi jalan sehingga mengakibatkan menurunnya indeks kualitas lahan
4. Kurang optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3
5. Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan
6. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dan satkeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH dan Penghijauan Kota oleh Perangkat Daerah terkait
- d. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
- f. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- g. Optimalisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### 3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran

Pada Misi 3 Tujuan 1 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel III.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2022 (n-1)	2023 (n)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	83,02	83,71
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	94,57	94,57*

Sumber : BPS Kota Madiun

**Tabel III.18.Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	83,71	102,46
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	94,57*	100

Sumber : BPS Kota Madiun

**Tabel III.19.Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi 2023	Realisasi Nasional 2023
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	74,65	N/A
	Indeks Pembangunan Gender	94,57*	91,67*	N/A

Sumber : BPS Kota Madiun

Angka tahun 2023 belum rilis\*

## 1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel III.20. IPM Kota Madiun Menurut Komponen**

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PENGELUARAN PER KAPITA
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503
2023	75,40	14,44	11,82	17.115

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2023

Selama 2019 hingga 2023, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2021

disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2022 dan 2023.

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2023, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 tahun (2019) menjadi 75,40 tahun (2023). Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2023 di Kota Madiun diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,40 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

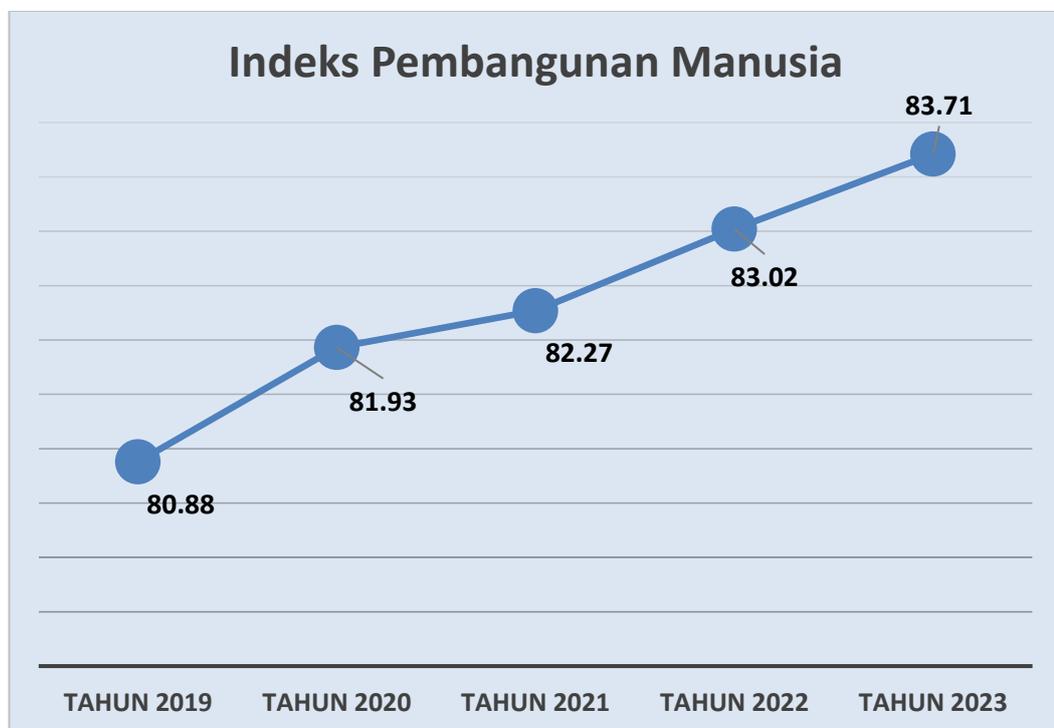
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2023, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,44 tahun (2023) atau naik sebesar 0,05 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,13 tahun (2019) menjadi 11,82 tahun (2023) atau naik 0,69 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2023, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,44 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang

semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Selanjutnya dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 17.115 juta per tahun, naik sekitar 3,7 persen dibanding tahun 2022 lalu yang tercatat Rp. 16.503.000,00.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2023 sebesar 83,71 atau tumbuh 0,83 persen (meningkat 0,69 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

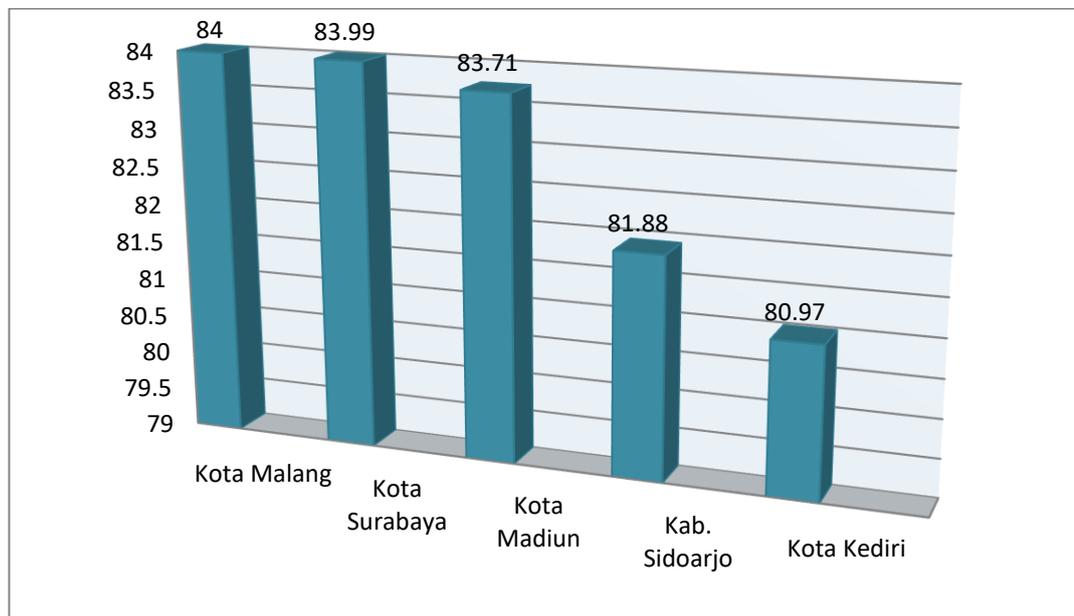
**Gambar III.10. Perkembangan IPM Kota Madiun 2019-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2023

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2023 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 83,71. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.

**Gambar III.11. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023  
5 (lima) besar Kab/Kota se Jawa Timur**



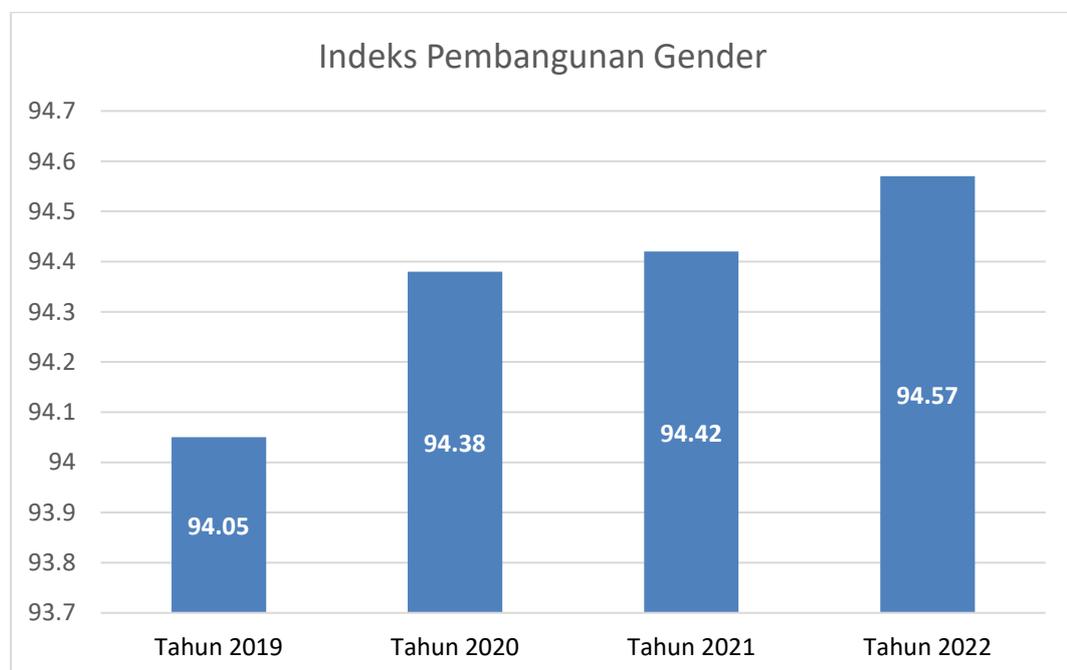
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023

## 2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Gambar III.12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2019-2022**



Sumber : BPS Kota Madiun 2022\*

Angka 2023 belum rilis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan. Indeks terendah ada pada tahun 2019 sebesar 94,05 dan yang tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar 94,57. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

**Tujuan "Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing" didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator** dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel. III.21. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 3 Tahun 2023**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,42	14,44	100,14
		Rata-rata Lama Sekolah	11,39	11,82	103,77
3.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83	73,44	100,83

3.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,20	78,03*	101,07*
-------	--	----------------------------------	-------	--------	---------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

\*Angka 2022 dikarenakan angka 2023 belum rilis

## A. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat :

### 1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2023, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,44 tahun (2023) atau naik sebesar 0,05 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 14,42 atau 100,14%. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2023, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,44 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

### Gambar III.13. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2023

Faktor pendorong meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

1. Sekolah gratis di Kota Madiun
2. Adanya program Bantuan Beasiswa Pendidikan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang tercukupi

Faktor penghambat meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu, masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

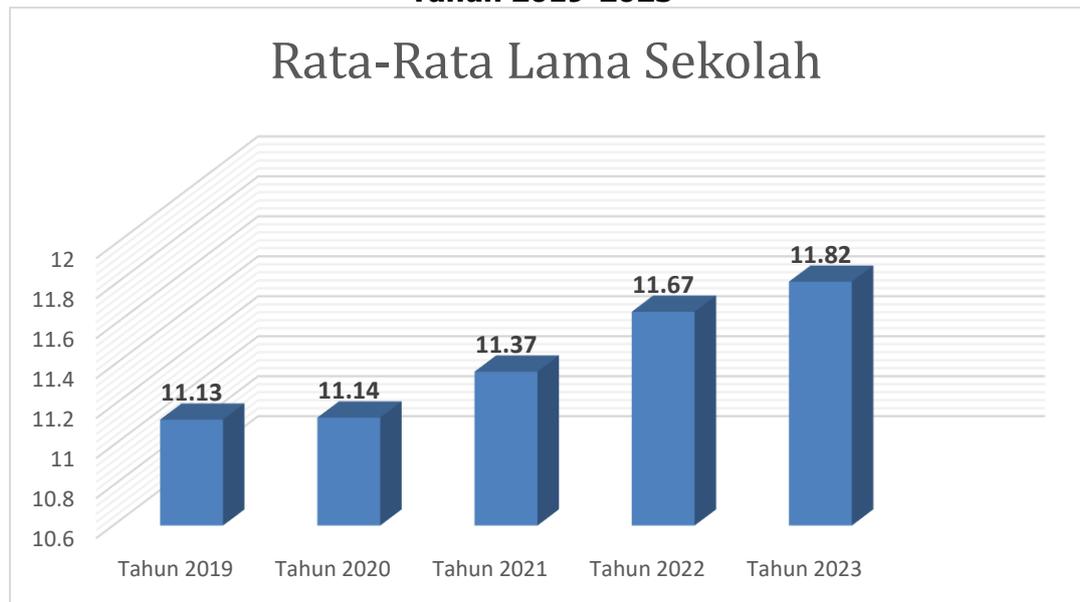
1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelatihan profesi guru (PPG)
2. Akan dibentuk tim untuk pendataan untuk anak tidak sekolah
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar

#### 4. Meningkatkan kualitas pendidikan

##### 2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator sasaran rata-rata lama sekolah di Tahun 2022 terjadi penyesuaian target sebagaimana tertuang dalam pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 yang mana pada RPJMD-P target rata-rata lama sekolah sebesar 11,15 dan pada RKPD Perubahan telah disesuaikan menjadi sebesar 11,39. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangan proyeksi rata-rata lama sekolah yaitu memperhatikan realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 dan 2022.

**Gambar III.14. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2023

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 11,13, kemudian meningkat di tahun 2020 yaitu 11,14, naik lagi di tahun 2021 sebesar 11,37. Pada tahun 2023 realisasi indikator ini sebesar 11,82 atau naik 0,15 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 11,67, sehingga capaian kinerjanya adalah 103,78% dari target yang telah ditetapkan 11,39.

Kenaikan trend realisasi Indikator RLS disebabkan oleh adanya faktor-faktor pendorong yaitu:

1. Sekolah gratis di Kota Madiun
2. Adanya bantuan laptop, seragam, ongkos jahit serta akses internet gratis
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
4. Akses sekolah yang mudah dan terjangkau

Faktor penghambat meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu, masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

## B. Sasaran 2 “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”:

### *Angka Harapan Hidup*

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2019 hingga 2023, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 tahun (2019) menjadi 73,44 tahun (2023) atau naik sebesar 0,69 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

### **Gambar III.15. Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2019-2023**



*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2023*

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan yang signifikan dari AHH di Kota Madiun dari Tahun 2019 ke Tahun 2023. Selain itu, indikator AHH tahun 2023 di Kota Madiun sudah melampaui target yang ditetapkan (100,84%). Walaupun AHH sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih diperlukan upaya yang mendukung peningkatan AHH agar tren AHH di Kota Madiun selalu meningkat setiap tahunnya.

Kenaikan tren AHH dan tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 ini karena adanya dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

- b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit tidak menular
- d. Kota Madiun sudah mendeklarasikan STBM sehingga sanitasi lingkungan sudah lebih baik.

Meskipun kondisi kesehatan di Kota Madiun sudah baik, namun masih ada isu yang menjadi perhatian, yaitu stunting. Prevalensi stunting di Kota Madiun sudah di bawah prevalensi nasional, tetapi masih diperlukan penanganan agar prevalensi stunting dapat terus ditekan.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH pada tahun 2023 yaitu:

1. Mempertahankan agar tidak ada kematian pada ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
2. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
3. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia.
4. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
5. Meningkatkan upaya penurunan prevalensi stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif

### **C. Sasaran 3 "Meningkatnya Pemberdayaan Gender"**

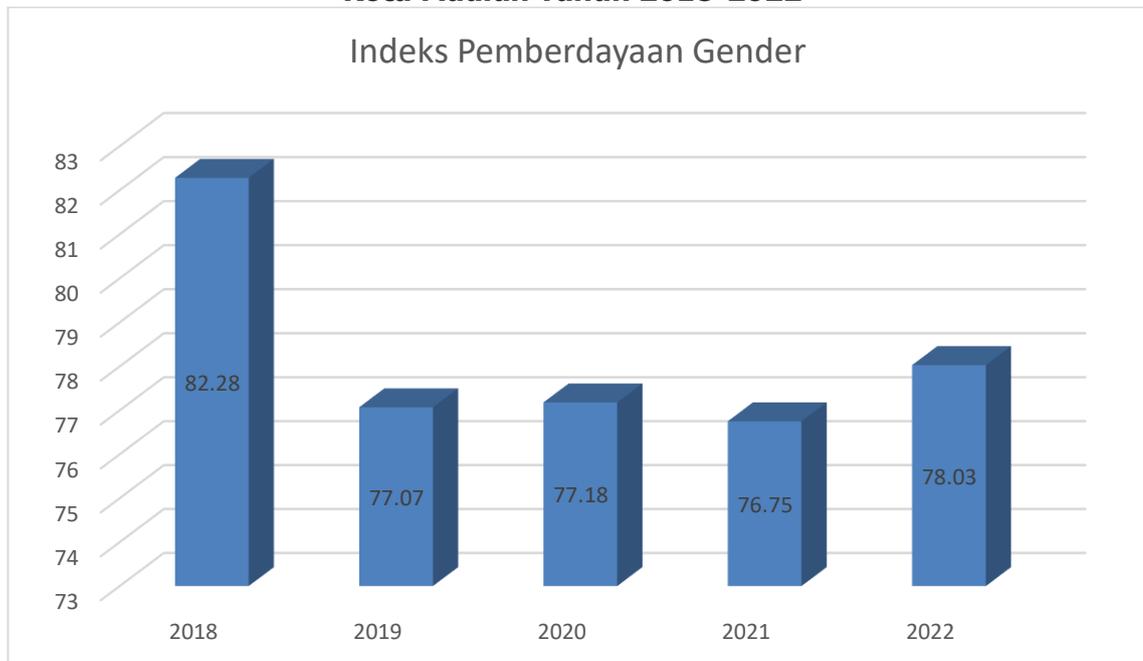
### *Indeks Pemberdayaan Gender*

IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

IDG di Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 82,28, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 menjadi 77,07 pada Tahun 2019. IDG Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun tersebut dipengaruhi oleh persentase keterwakilan anggota perempuan di DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Pada Tahun 2020, IDG mengalami kenaikan menjadi 77,18 yang menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,75, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IDG Tahun 2022 naik kembali menjadi 78,03, hal ini disebabkan oleh perekonomian yang mulai membaik, Perdagangan online yang makin marak mendesak posisi perempuan terbiasa bekerja di wilayah UMKM sehingga dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga. IDG Tahun 2023 belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik baik dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Gambar III.16. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kota Madiun 2022\* (Angka 2023 belum rilis)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut:

*Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- Lebih mengintensifkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada perempuan agar lebih berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik
- Dilakukannya pelatihan kepada perempuan agar lebih mandiri sehingga dapat membantu perekonomian keluarga sehingga terjadi keseimbangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki

- c. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- d. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

*Kedua*, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

*Ketiga*, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;

- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

**4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun didukung oleh 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran**

**Pada Misi 4 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :**

**Tabel III.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2022 (n-1)	2023 (n)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87	6,87**

**Tabel III.23. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	106,68%**

**Tabel III.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi 2023	Realisasi Nasional 2023
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87**	6,00**	6,31**

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, Bappelitbangda Provinsi Jawa Timur

\*\*Angka 2021 dikarenakan angka 2022 belum rilis

### 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Pilar tersebut yaitu :

1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita
  - Share manufaktur terhadap PDRB
  - Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal
- b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja
- Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator :
- Tingkat kesempatan kerja
  - Persentase Penduduk Bekerja Penuh
  - Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas
- c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi
- Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :
- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
  - Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
  - Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang
- 2) PILAR 2 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
- Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.
- a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

Dengan indikator :

- Rasio Pendapatan Gini
- Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indikator:

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

a. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator :

- Angka Harapan Lama Sekolah

- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
  - Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan
- b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar
- Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Dengan Indikator :
- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
  - Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri
- c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif
- Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan Indikator :
- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
  - Rasio kredit perbankan UMKM

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di RPJMD Kota Madiun ditargetkan di tahun 2023 sebesar 6,40, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan indikator yang dihitung oleh BAPPENAS dan terakhir mengeluarkan angka penghitungan di tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan 2023 BAPPENAS belum mengeluarkan nilai lagi sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi

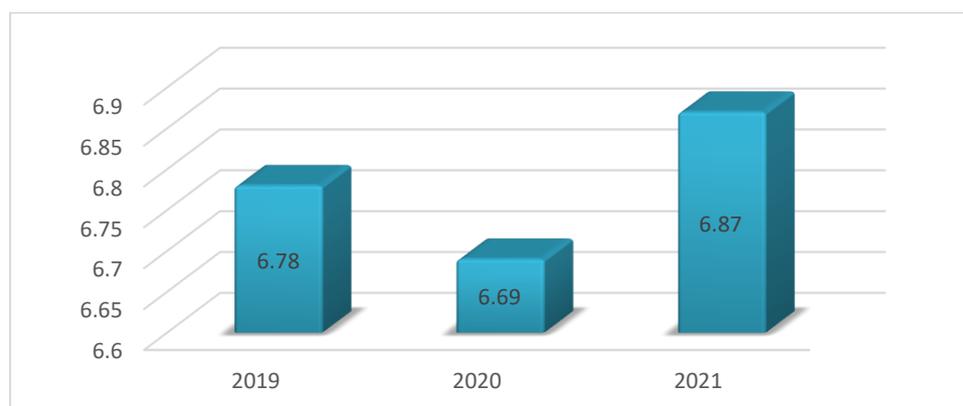
Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan. Untuk tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga pilar yaitu:

1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri)
2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto)
3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar)

Meskipun demikian Pemerinta Kota Madiun tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di tiga pilar tersebut, yaitu :

1. Dengan menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan dengan kegiatan-kegiatan padat karya di kelurahan-kelurahan
2. Penyediaan jejaring pengaman sosial
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Menetapkan kebijakan publik yang memadai

**Gambar III.17 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif  
Tahun 2019 s.d. 2021**



Sumber : BAPPENAS

**Tujuan “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator** dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel III. 25. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 4 Tahun 2022**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	6,15	5,85	104,88
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	10,16	5,6	55,11
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa	11,32	24,7	218,19

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

#### **A. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka**

##### *Tingkat Pengangguran terbuka*

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit

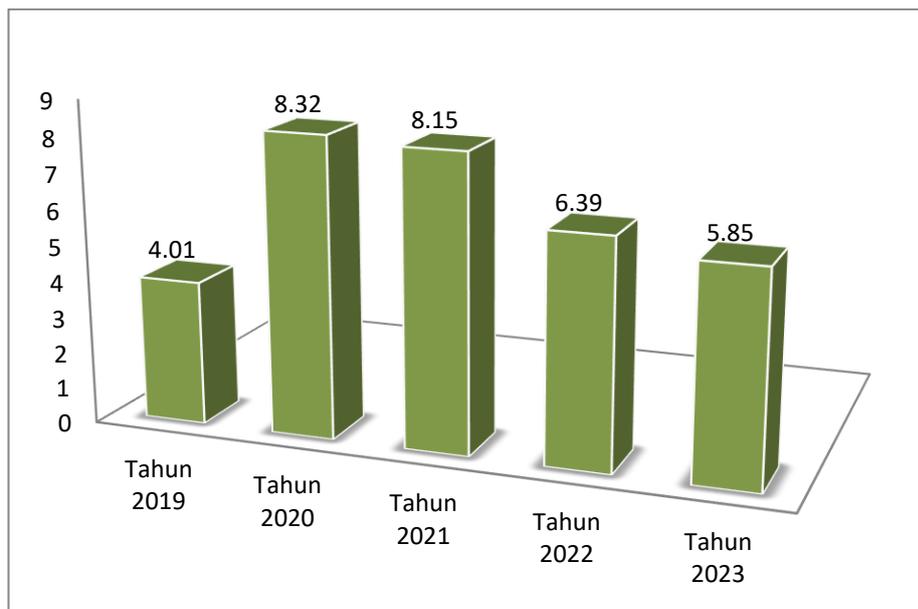
(orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019 – 2024 sebesar 6,15%. Berdasarkan hasil Sakernas oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 5,85%, dengan demikian Angka TPT tahun 2023 sudah memenuhi target TPT tahun 2023, dengan capaian kinerja sebesar 104,88%.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.18. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2019-2023**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Madiun tahun 2022 sebesar 6,39% dan TPT tahun 2023 sebesar 5,85%, turun sebesar 0,54 poin persen. Penurunan TPT ini menggambarkan keberhasilan program kerja dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di tahun 2022 dan 2023.

Penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2023 tercatat mencapai 161,43 ribu jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 16,61 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Apabila dilihat dari pola usia kerja dalam rentang tiga tahun terakhir ini, usia kerja di Kota Madiun menunjukkan pola yang hampir sama dimana jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding jumlah bukan angkatan kerja.

**Tabel III. 26. Status Keadaan Ketenagakerjaan**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agustus (2022- 2023)	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	144.820	161.428	16.608	11,47
<b>Angkatan Kerja</b>	96.815	111.852	15.037	15,53
- <b>Bekerja</b>	90.627	105.313	14.686	16,20
- <b>Pengangguran</b>	7.859	6.539	351	5,67
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	48.005	49.576	1571	3,27
	<b>persen</b>	<b>persen</b>	<b>persen</b>	<b>persen</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	6,39	5,85	-0,54	
- <b>Laki-laki</b>	9,85	6,07	-3,78	
- <b>Perempuan</b>	2,30	5,57	3,27	
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	66,85	66,85	-0,02	
- <b>Laki-Laki</b>	75,94	78,69	2,75	
- <b>Perempuan</b>	58,56	60,42	1,86	

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran dari tahun 2022 ke tahun 2023, dimana jumlah angkatan kerja di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 15,53 persen poin dan bukan angkatan kerja mengalami kenaikan 3,27 persen poin.

Lebih detilnya, penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2022 penduduk bekerja sebanyak 90.627 jiwa, pengangguran 6.188 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 48.005 jiwa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2023 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 105.313 jiwa, pengangguran sebanyak 6.539 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 49.576 jiwa.

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2022 ke 2023 terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan jumlah penduduk bekerja yang meningkat, namun jumlah pengangguran menurun. Pada tahun 2023 jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 14.686 jiwa atau naik sebesar 16,20 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 7.859 menjadi 6.539 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 351 jiwa atau 5,67 persen. Kenaikan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja dari 48.005 menjadi 49.576 jiwa, dengan jumlah kenaikan sebanyak 1571 jiwa atau 3,27 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 144.820 jiwa menjadi 161.428 jiwa di tahun 2023, dengan persentase kenaikan sebesar 11,47%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebesar 5,85 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 6.539 orang dengan angkatan kerja sebesar 111.852 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,54 % dari TPT tahun 2022 yaitu sebesar 6,29 %, dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 351 orang. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 ini diakibatkan oleh banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen

calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 11,47 persen poin dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 16.608 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 15.037 orang. Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2023 sebesar 6,15 %, realisasi TPT tahun 2023 sebesar 5,85 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominan oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.

#### A. Faktor Pendorong

1. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai berkembang setelah selesainya pandemi COVID-19.
2. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku usaha/pemberi kerja dari dalam dan luar negeri.
3. Industri kreatif yang semakin berkembang didukung perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat.
4. Terjalannya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam peningkatan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta penempatan para pencari kerja.

#### B. Faktor Penghambat

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab

pengangguran dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.

3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan skill yang tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan. Hal ini disebabkan karena jarangya pelamar yang memiliki banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.
4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

C. Upaya yang dilaksanakan dan Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)

- e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- f. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- g. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- h. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- i. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
- j. *Updating* data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun.

## **B. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”**

### *Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan*

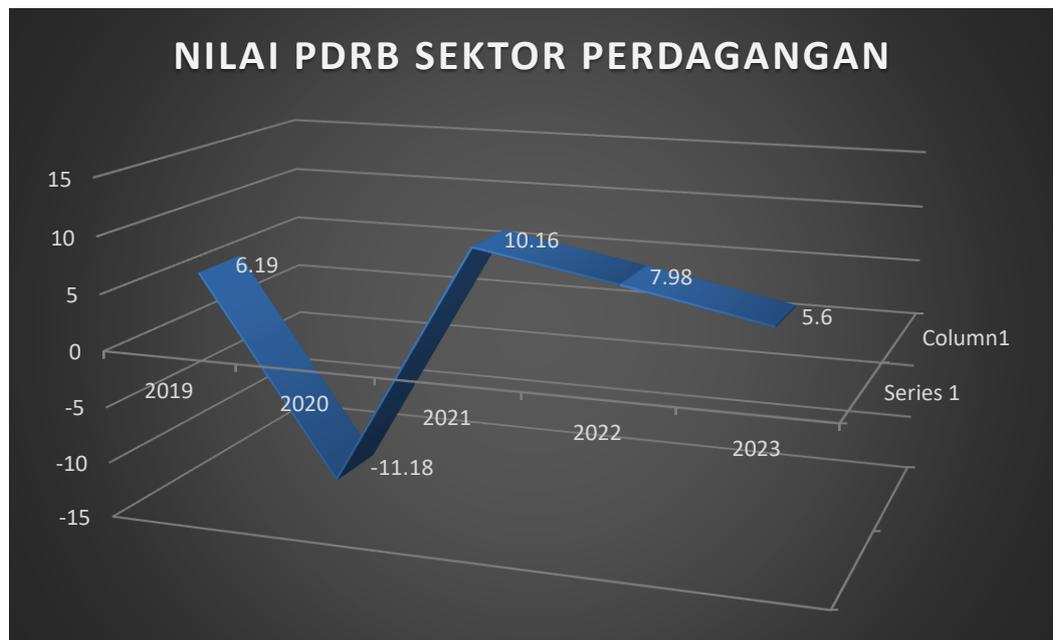
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; konstruksi;

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan.

PDRB sektor perdagangan berdasarkan realisasi data BPS tahun 2023 sebesar 5,60% atau berada dibawah target yaitu 10,16%. Hal tersebut terjadi bukan karena menurunnya aktivitas perdagangan namun karena perbandingan meningkatnya PDRB pada kategori lainnya sangat tinggi sehingga kategori pada sektor perdagangan terlihat menurun. Hal ini dibuktikan dengan total peningkatan pada secara keseluruhan tingkat perekonomian Kota Madiun tahun 2023 sebesar 5,80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,52%. Adapun perkembangan PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun mulai tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Gambar III.19. PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun  
Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS Kota Madiun

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat (WARTEK Inflasi).
2. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
3. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat
4. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat.

Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah
2. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah
3. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah
4. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku

#### *Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa*

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional. usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Pendidikan/Education Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

Jasa Kesehatan cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Jasa Lainnya/Other Services Activitie Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

**Gambar III.20 PDRB Sektor Jasa di Kota Madiun Tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS Kota Madiun

Untuk data Tahun 2023 capaian PDRB sektor jasa Tahun 2023 mencapai 24,7% jauh berada diatas target sebesar 11,32%. Untuk data series pertumbuhan PDRB sektor jasa atas dasar harga konstan menurut BPS pada tahun 2022 adalah sebesar 21,57 dengan capaian 190,54%. Pada tahun 2021 adalah sebesar 11,32 dengan capaian sebesar 195,17% jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -0,93 atau mengalami kenaikan sebesar 12,25 poin Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya Rem Covid-19 Gas Ekonomi dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara lain:

1. Revitalisasi pasar – pasar yang ada di Kota Madiun.
2. Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun.
3. Pembangunan lapak – lapak di kelurahan se-Kota Madiun.
4. Pembangunan jalur sepeda wisata penghubung lapak.
5. Pengawasan dan kalibrasi berbagai macam alat ukur yang digunakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya .

Faktor Penghambat:

1. Promosi daerah melalui event – event masih harus ditingkatkan.
2. Tenaga ahli bidang kesehatan dan pendidikan masih banyak dibutuhkan.

Faktor Pendorong:

1. Tingkat inflasi daerah yang terkendali.
2. Tersedianya jaminan sosial melalui asuransi tenaga kerja, kesehatan dan kematian bagi pekerja.
3. Menurunnya angka kemiskinan.
4. Sarana prasarana umum atau fasilitas publik yang memadai seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan lain – lain.

**Pada Misi 4 Tujuan 2 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut**

**Tabel III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2022 (n-1)	2023 (n)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	81,25	82,88
	Indek Gini	0,35	0,398*	0,398*

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

**Tabel III.28 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	82,88	107,36
	Indek Gini	0,35	0,398*	86,29*

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

**Tabel III.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi 2023	Realisasi Nasional 2023
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88	N/A	N/A
	Indek Gini	0,398*	0,365*	0,381*

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

Keterangan : \* data sementara (2022)

## 1. Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Capaian indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2023 adalah 105,73% dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024. Peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman:

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

**Gambar III.21 Indeks Ketentraman Kota Madiun  
Tahun 2019-2023**



Sumber : Satpol Kota Madiun

Survei Indeks Ketentraman mulai dilaksanakan tahun 2020 dengan hasil nilai 76,87 kemudian tahun 2021 mendapatkan nilai 78,74 naik 1,87 poin dibanding tahun sebelumnya, tahun 2022 didapatkan nilai 81,25 naik 2,51 poin dibanding tahun 2021, kemudian tahun 2023 ini didapatkan nilai 82,88 dengan beringkat "B" atau status/predikat "KONDUSIF" naik 1,63 poin dibanding tahun 2022. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa tren setiap tahun selalu positif (naik) untuk hasil nilai survei indeks ketentraman. Hasil nilai indeks dipengaruhi beberapa faktor yang mendorong kenaikan nilai survei setiap tahun.

Pada deskripsi nilai variable, diketahui bahwa V-20 Kegiatan Pencegahan/Penindakan merupakan peringkat pertama dengan nilai 84,246 sedangkan peringkat paling rendah yakni V-2 Ancaman/Gangguan Kriminalitas Jalan/tempat-tempat Umum dengan perolehan nilai 70,881. Variabel lain

yang masuk kategori bernilai rendah yakni pada V-3 Resiko Gangguan Keamanan Fisik dan Mental/Spiritual = 71,871, V-13 Bebas dari Pelanggaran HAM = 72,989, V-9 Ekonomi = 74,316 dan V-1 Ancaman/Gangguan Kriminalitas Lingkungan Perumahan/Permukiman = 75,024.

Faktor pendorong yaitu kesadaran aparaturnya dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat juga memiliki peran dalam meningkatkan ketentraman, oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi sistem ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan, diantaranya dengan mengedukasi dan menyadarkan untuk ikut peduli terhadap ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini sekaligus mengingatkan, bahwa setiap masyarakat /komunitas membutuhkan ketentraman dan ketertiban untuk mendukung berbagai aktivitas.

Terkait dimensi yang mendapatkan nilai paling rendah, yakni dimensi pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan maka rencana tindak lanjut, antara lain:

1. Pemerintah Kota Madiun harus mampu menciptakan kesadaran akan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, langkah/cara yang ditempuh: 1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang kedisiplinan, kerjasama antar warga, dan pentingnya pemahaman akan ketentraman, ketertiban dan kesadaran masyarakat. 2) Melakukan program pembinaan yang jelas secara berjenjang melalui bidang pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
2. Sedangkan untuk ketentraman, maka dalam rangka mewujudkan dan menjaga ketentraman, maka masyarakat didorong dan diberi teladan antara lain: 1) Melakukan Ronda Malam. Ronda malam salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

2) Tidak Membuang Sampah Sembarangan. 3) Gotong-Rotong. 4) Mentaati Norma dalam Masyarakat.

Terkait dengan nilai variabel dengan nilai terendah yakni variabel Ketimpangan Ekonomi yang mendapatkan nilai rendah, maka disarankan/direkomendasikan, antara lain:

1. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi di masyarakat, dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Selain itu, mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya.
2. Lebih mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Madiun, salah satunya keberadaan destinasi pariwisata yang terus menggeliat dan mendapatkan apresiasi sekaligus menjadi magnet baru bagi masyarakat luar Kota Madiun yang terus membanjiri obyek-obyek wisata. Hal ini mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha, dengan memberi ruang lebih besar kepada masyarakat bermodal kecil, sehingga akan mampu menekan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi.

## 2. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.

Penghitungan Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

dimana,

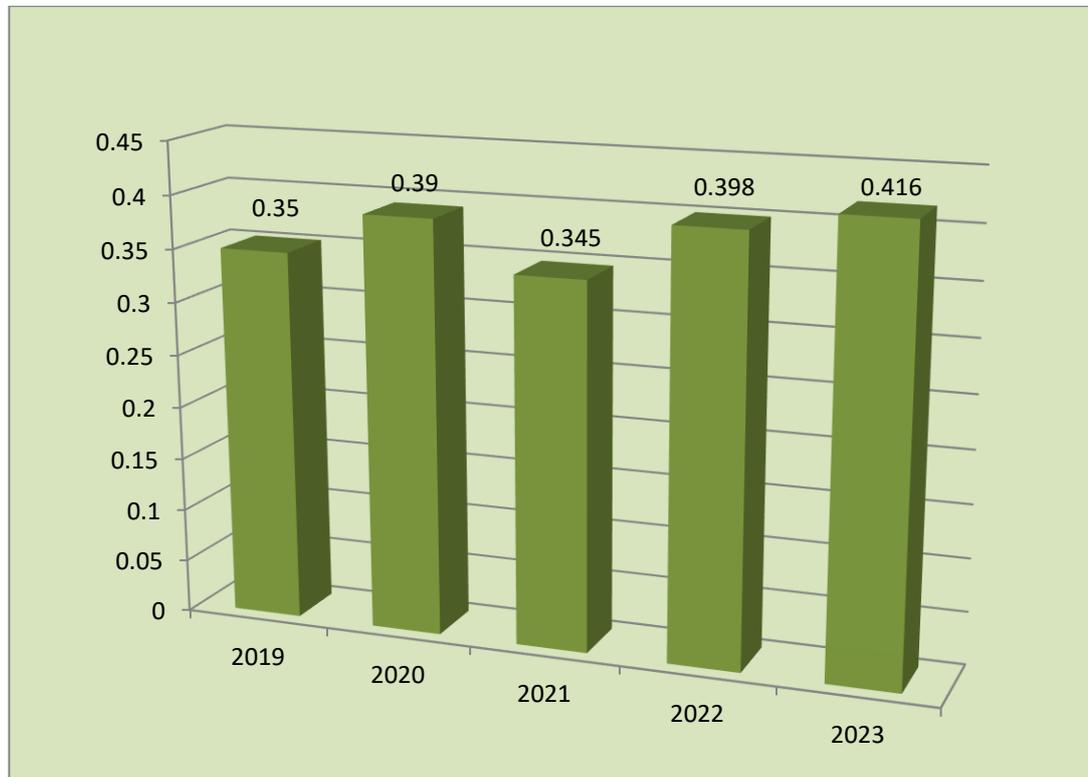
- GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)
- $P_i$  : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- $F_i$  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- $F_{i-1}$  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut :

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$x = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$x = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Adapun data series Indeks Gini Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

**Gambar III.21 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2019-2023**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun*

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2019 sebesar 0,35, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan ketimpangan dari Tahun 2019 menjadi sebesar 0,39, kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah. Untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan angka yang artinya membaik dari Tahun 2020 menjadi sebesar 0,345, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks Gini pada Tahun 2022 mengalami penurunan angka kembali menjadi

sebesar 0,398, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi. Kejadian yang sama juga terjadi di tahun 2023 yaitu kenaikan Indeks Gini di angka 0,416. Meskipun angkanya naik tetapi kondisi ketimpangan di Kota Madiun masuk dalam kategori ketimpangan moderat atau sedang yang di antara angka  $0,4 < x < 0,5$ . Hal ini karena kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang signifikan yang juga berlaku secara nasional.

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah.
- 2) Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT.
- 3) Bantuan Sosial Air Bersih
- 4) Bantuan Sosial Lansia Non Potensial
- 5) Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar
- 6) Santunan Kematian
- 7) Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya)
- 8) Bantuan Sosial untuk Janda Perintis
- 9) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 10) Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 11) Melakukan pemberdayaan UMKM dan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya
- 12) Mengintensifkan warung tekan inflasi dalam upaya penyetabilan harga

**Tujuan “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :**

**Tabel. III.30. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 5 Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	
4.2.1	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,77	4,74	100,63
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	74,46	77,80	104,48
		Indeks Rasa Aman	82,18	82,47	100,35

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Bakesbangpol, Satpol PP, Bakesbangpol Kota Madiun*

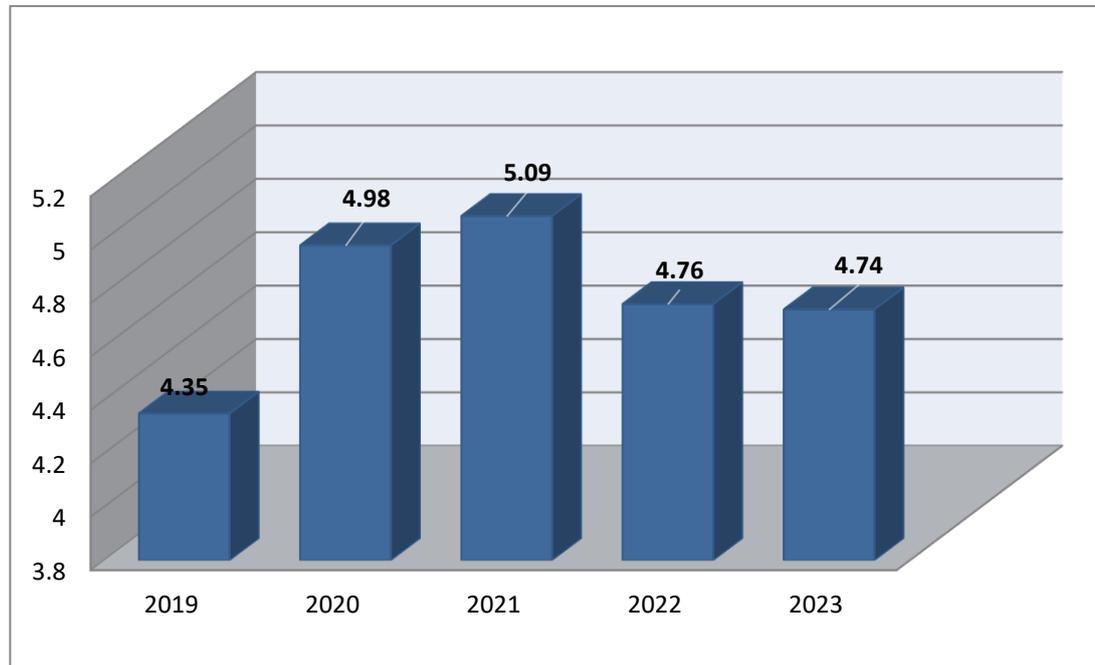
#### **A. Sasaran “Pengurangan Kemiskinan”**

##### ***Angka Kemiskinan***

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023 bahwa indikator sasaran pengurangan kemiskinan juga mengalami penyesuaian target sebagaimana tertuang pada RPJMD Perubahan, semula pada RPJMD target pengurangan kemiskinan sebesar 4,65 disesuaikan menjadi 4,77. Hal ini berdasarkan proyeksi penghitungan angka kemiskinan di Kota Madiun.

Tahun 2022 angka kemiskinan turun seiring dengan meningkatnya perekonomian secara global dari 5,09 (9.060 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,76 (8.490 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 514.409,00 menjadi Rp 551.620,00 atau naik sebesar Rp 37.211,00.

Tahun 2023 angka kemiskinan kembali turun dari 4,76 (8.490 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,74 (8.460 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 551.620,00 menjadi Rp 605.131,00 atau naik sebesar Rp 53.511,00.

**Gambar III.30 Persentase Angka Kemiskinan Periode 2019-2023**

Sumber : BPS Kota Madiun 2023

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT.
3. Bantuan Sosial Air Bersih.
4. Bantuan Sosial Lansia Non Potensial.
5. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
6. Santunan Kematian.
7. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
8. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
9. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
10. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.

## B. Sasaran "Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat"

### 1. Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2023 adalah 77,80 dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,46 dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,48 %. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 75,68 dengan kenaikan persentase capaian kinerja sebesar 2,76%.

Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

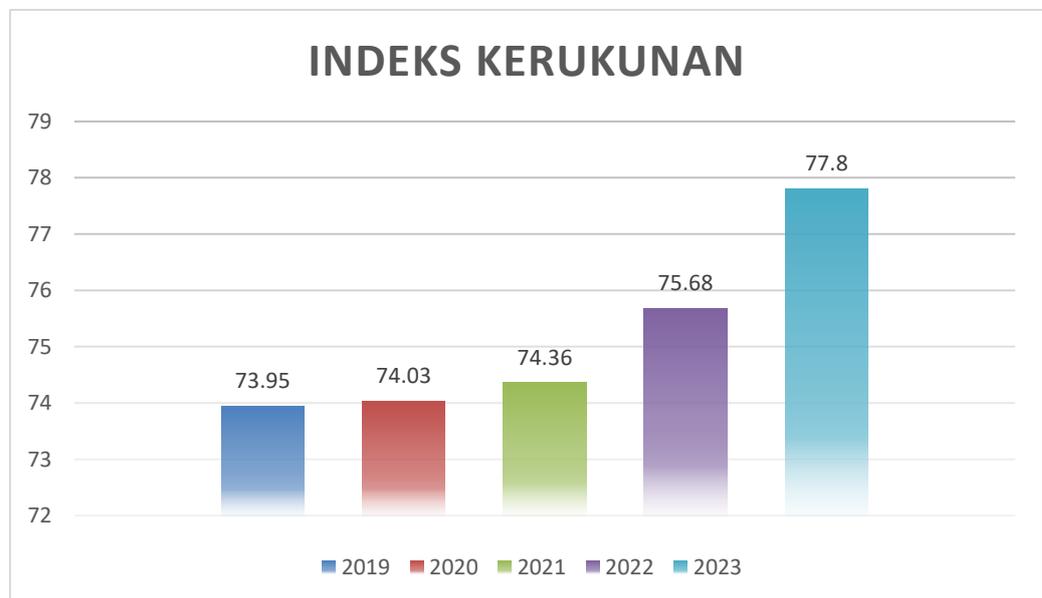
1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi Jejaring Panca Mandala (JPM)
4. Sarasehan Bela Negara
5. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
6. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini

8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat

**Tabel III.31 Data Series Capaian Indeks Kerukunan Kota Madiun  
Tahun 2019-2023**



NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI KINERJA
1.	2019	2,65	3,70 atau 73,95
2.	2020	2,77	3,7015 atau 74,0306
3.	2021	74,30	74,36
4.	2022	74,40	75,68
5.	2023	74,46	77,80

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2023

**2. Indeks Rasa Aman**

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan

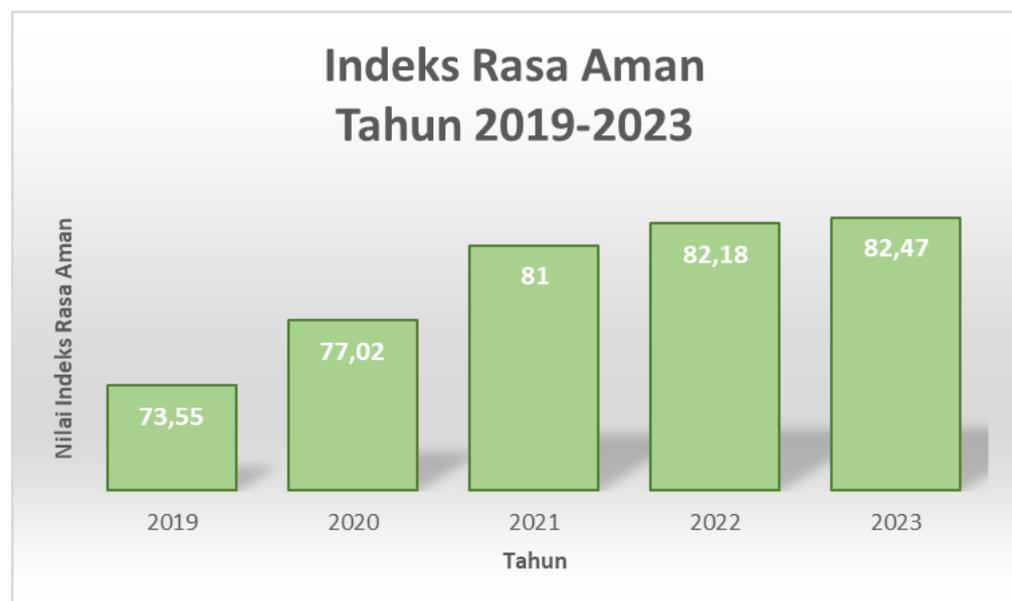
timbulnya ancaman terhadap jiwa , harta dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan

Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi.

Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

- Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

**Gambar III.31 Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2023**



Sumber : Satpol PP Kota Madiun

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2023 adalah sebesar 82,47 dengan peringkat “A” dengan predikat “AMAN TERKENDALI”, dilihat dari grafik di atas mulai tahun 2019-2023 nilai indeks mengalami kenaikan tiap tahun. Mulai tahun 2019 mendapatkan nilai 73,55 kemudian tahun 2020 mendapatkan nilai 77,02 naik 3,47 poin dibanding tahun sebelumnya, untuk tahun 2021 mendapatkan nilai 81 dan tahun 2022 mendapatkan nilai 82,18 naik 1,18 poin dari tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2023 ini mendapatkan nilai 82,47 naik 0,29 poin dibanding tahun 2022.

Faktor pendorong hasil nilai Indeks rasa aman dipengaruhi oleh rutin nya patroli dari petugas Satpol PP yang berkoordinasi dengan Polri serta didukung oleh peran serta masyarakat dengan dilakukannya sistem ronda malam di masing-masing RT/RW di lingkungan Kota Madiun yang turut menjaga keamanan dilingkungan masing-masing.

Rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan atau peningkatan indeks rasa aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023:

1. Melanjutkan kegiatan patroli petugas dengan berkoordinasi dengan Polri
2. Melanjutkan sistem ronda malam di RT/RW di Lingkungan Kota Madiun
3. Menyelenggarakan advokasi dan kampanye anti kekerasan kepada masyarakat
4. Menegakkan Perda/Perkada secara tegas

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2023, total anggaran belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.280.060.781.955,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja operasi dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis.

Realisasi belanja APBD Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

**Tabel III.32 Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2023**

<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Belanja Modal</b>	222.872.275.205,00	217.790.302.662,69	97,72%
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	30,83%
<b>Belanja Operasi</b>	1.053.170.646.108,00	975.873.375.042,70	92,66%
<b>Total APBD</b>	1.280.060.781.955,00	1.194.902.395.527,39	93,35%

Sumber : BKAD Kota Madiun

**Tabel III.33 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis  
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	751.911.498.311,00	696.073.129.886,00	92,58

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	43.865.984.134,00	41.039.974.111,64	93,56
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota	136.237.092.552,00	132.608.342.154,67	97,34
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	32.571.095.206,00	31.316.803.358,18	96,15
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	121.567.759.207	66.179.461.798,04	54,44
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	110.305.891.466,00	104.996.120.203,24	95,19
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	96,46
Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka	4.441.983.697,00	3.652.020.938,68	82,22
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	22.770.126.765,00	20.622.409.792,90	90,57
Pengurangan Kemiskinan	25.763.768.779,00	24.225.444.615,00	94,03

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial	28.567.631.138,00	26.470.379.541,00	92,66

Sumber : BKAD Kota Madiun

**Tabel III.34 Realisasi Anggaran Per Program  
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023**

No.	Program	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	629.347.466.067,97
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	104.946.970.140.5
3.	Program Pengembangan Kurikulum	4.282.839.413.2
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.591.415.200.00
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.697.529.640.24
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	749.215.874.00
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	86.676.500
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.125.354.466
9.	Program Pengendalian Penduduk	701.551.430
10.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.226.608.033
11.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.409.184.260

No.	Program	Realisasi
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.010.488.116
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.095.000
14.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi	16.367.960.473.67
15.	Program Penataan Bangunan Gedung	45.720.190.655
16.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	12.318273.218
17.	Program Penyelenggaraan Jalan	33.622.923.546
18.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	699.751.992
19.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	919.981.420
20.	Program Pengembangan Perumahan	2.284.725.563
21.	Program Kawasan Permukiman	5.955.079.435
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	22.907.366.847,33
23.	Program Pengelolaan Izin Lokasi	10.347.750
24.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	32.249.185
25.	Program Penatagunaan Tanah	218.354.950
26.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.089.711.388
27.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.075.470.970
28.	Program Penanggulangan Bencana	1.383.150.402
29.	Program Pemberdayaan Sosial	3.621.916.059

No.	Program	Realisasi
30.	Program Rehabilitasi Sosial	2.759.004.510
31.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.598.123.900
32.	Program Penanganan Bencana	557.893.500
33.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	168.359.248
34.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.052.738.714
35.	Program Perlindungan Perempuan	238.647.650
36.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	253.631.300
37.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	102.384.500
38.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	259.447.124
39.	Program Perlindungan Khusus Anak	78.067.240
40.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.845.107.133
41.	Program Penempatan Tenaga Kerja	167.363.350
42.	Program Hubungan Industrial	1.639.550.455,69
43.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	456.964.000
44.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	151.363.900
45.	Program Pengembangan UMKM	201.326.325
46.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	283.918.745
47.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	374.480.185
48.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	499.880.150

No.	Program	Realisasi
49.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	32.473.700
50.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	74.670.975
51.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	184.615.317
52.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	34.353.600
53.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	182.429.109
54.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.151.431.701
55.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	419.957.100
56.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	310.429.397
57.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	155.018.250
58.	Program Perizinan Usaha Pertanian	25.025.150
59.	Program Penyuluhan Pertanian	1.851.260.975
60.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	283.494.300
61.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.106.894.600
62.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	76.530.800
63.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.855.000
64.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin	319.872.000

No.	Program	Realisasi
	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
65.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	618.230.100
66.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	143.579.000
67.	Program Pengelolaan Persampahan	5.554.028.825,85
68.	Program Pendaftaran Penduduk	187.002.585
69.	Program Pencatatan Sipil	169.333.600
70.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	213.580.610
71.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.588.872.736
72.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.976.856.378
73.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.620.264.366
74.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.426.700
75.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	284.892.875
76.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30.371.000
77.	Program Promosi Penanaman Modal	294.344.205
78.	Program Pelayanan Penanaman Modal	780.764.791
79.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	434.873.708
80.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	187.863.400

No.	Program	Realisasi
81.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0
82.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	469.713.928
83.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.397.737.750
84.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.885.539.500
85.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	49.883.250
86.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	49.842.900
87.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	436.897.915
88.	Program Pemasaran Pariwisata	1.138.444.624
89.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	277.650.600
90.	Program Pembinaan Perpustakaan	988.000.144
91.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	103.629.500
92.	Program Pengelolaan Arsip	688.097.607
93.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	158.766.300
94.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	267.325.700
95.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.266.057.440
96.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	249.511.500
97.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	230.943.400
98.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	305.193.000

No.	Program	Realisasi
99.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.172.637.195
100.	Program Perekonomian dan Pembangunan	771.431.271
101.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.678.231.395
102.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.705.918.453
103.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.242.483.870
104.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.242.444.619
105.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.363.870.322
106.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.845.140.170
107.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.246.961.400
108.	Program Kepegawaian Daerah	1.883.854.984
109.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.362.534.451
110.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	360.368.868
111.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	905.128.381
112.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.202.708.789,64
113.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.174.966.190
114.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.803.870.950
115.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	380.865.600

No.	Program	Realisasi
116.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	343.465.340
117.	Program Peningkatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	11.987.343.533
118.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	162.533.500
119.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	670.721.308
120.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.757.983.100

Sumber : BKAD Kota Madiun

### C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

**Tabel III.34 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Atas Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	123,395%	92,58%	30,81

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	95,9%	93,56%	2,34
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota	100,02%	97,34%	2,68
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	104,27%	96,15%	8,12
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	101,95%	54,44%	47,51
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,84%	95,19%	5,65
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	101,07%	96,46%	4,61
Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka	104,88%	82,22%	22,66
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	122,82%	90,57%	32,25
Pengurangan Kemiskinan	100,63%	94,03%	6,6

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial	106,3%	92,66%	13,64

Dari 11 (sebelas) sasaran Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) sasaran yang capaian kinerja yang tidak mencapai 100%, sedangkan untuk capaian anggaran seluruh sasaran tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan realisasi anggarannya tidak mencapai 100%.

Selain pencapaian kinerja dimaksud Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan di tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Penghargaan Wali Kota Madiun sebagai Pembina K3 terbaik tingkat Jawa Timur
2. Penghargaan Zero Accident, Tanggap Covid-19, dan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS kepada 24 perusahaan di Kota Madiun
3. Juara 1 Investment Award 2022 Tingkat Provinsi Jawa Timur Kepada PT Nitama Kota Madiun
4. Terbaik 1 dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Tingkat Provinsi.
5. Piala Adipura untuk 2022 diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya
6. Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wali Kota Madiun
7. Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono
8. Penghargaan Kepada Marsid Marsito Hadi Anggota Satlinmas Kelurahan Kejuron dari Gubernur Jawa Timur atas Pengabdian 34 tahun

9. Penghargaan Kepada Wali Kota Madiun sebagai Tokoh Penunjang Pendidikan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur
10. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat
11. Penghargaan Kepada Wali Kota Madiun atas Partisipasi dan Dukungan Anggaran serta Prasarana Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
12. Penyusunan Program Terbaik di Jawa Timur untuk PKK Kota Madiun Kategori Kota.
13. Top 5 Champion Project kategori Enabling Environment untuk Inovasi Kampung Penggerak Literasi TIK (Kartika) dari KIM Pandan Arum Kelurahan Pangongangan dalam World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2023 yang digelar International Telecommunication Union (ITU), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
14. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
15. Penghargaan PPKM Award 2023 Kementerian Kesehatan untuk Gerai Vaksinasi Sumber Wangi kategori Sentra Vaksinasi Covid 19.
16. Deklarasi Kota Lengkap oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Kota Madiun pertama di Jawa Timur dan Kedua Nasional.
17. Top BUMD Award Bintang 5 untuk Perumda Tirta Taman Sari Kota Madiun dalam Top BUMD Award 2023 oleh Majalah Top Business.
18. Top Pembina BUMD 2023 kepada Wali Kota Madiun, Madiun
19. Top CEO BUMD 2023 kepada Suyoto, Dirut Perumda Tirta Taman Sari.
20. Rekor MURI untuk Pemrakarsa dan Penyelenggara Pembagian Laptop Chromebook Terbanyak, (9.400 unit).

21. Penghargaan dari Universitas Negeri Surabaya Kepada Wali Kota Madiun atas Komitmen dan Kepedulian Dalam Pengembangan Bidang Pendidikan di Kota Madiun tahun 2023.
22. Penghargaan Kota Madiun sebagai Kabupaten/Kota dengan Capaian Deteksi Dini PTM Tertinggi di Jawa Timur tahun 2022.
23. Penghargaan Kepada Wali Kota Madiun, Madiun sebagai Tokoh Inovator Keinsinyuran oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Jawa Timur.
24. Penghargaan kepada Wali Kota Madiun atas Pelopor dalam Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan melalui Prestasi Pencapaian Lima Pilar STBM untuk Berkelanjutan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.
25. Penghargaan Peringatan Hari Kartini kepada Sudarmi Sudjut Murjawati Kader Kesehatan 42 Tahun.
26. BKN Award Peringkat ke-IV Pemerintah Kota Tipe Sedang Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.
27. BKN Award Peringkat ke-II Pemerintah Kota Tipe Sedang Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.
28. BKN Award Peringkat ke-IV Pemerintah Kota Tipe Sedang Kategori Pengembangan Kompetensi.
29. Medali Emas Kejurprov cabor sepeda untuk Naufal Farhan Nugie.
30. Medali Emas Kejurprov cabor sepeda untuk Sulthon Muhammad.
31. Juara II iBangga Award 2023 tingkat Provinsi Jawa Timur.
32. Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik Tingkat Nasional untuk Kampung KB Sejahtera Kelurahan Klegen.
33. Tanda Jasa Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Wali Kota Madiun, Madiun dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
34. Terbaik pertama Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur 2023 kategori Kota untuk Kelurahan Manguharjo.
35. Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

36. Penghargaan Tokoh Pembina Koperasi kepada Wali Kota Madiun, Maidi dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur.
37. Penghargaan Wira Karya Bhakti Koperasi kepada R Andriyono Waskito Murti dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur.
38. Penghargaan kepada Wali Kota Madiun Maidi dari Kepala BKKBN atas pencapaian dan komitmen terhadap penurunan angka prevalensi stunting di Kota Madiun tahun 2022.
39. Juara 1 Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas untuk Kampung KB Sejahtera Kelurahan Klegen.
40. Juara 1 PKK Sehat Lestari Berencana kategori PHBS LBS tingkat Provinsi Jatim untuk Kelurahan Manisrejo.
41. Juara 1 Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tingkat Provinsi untuk Desi Dwi Prastiwi.
42. Juara 2 KB Lestari 20 tahun tingkat Provinsi untuk Ninik Sismiati-Jariyanto.
43. Juara 3 Bina Keluarga Balita (BKB) Holistic Integratif (HI). tingkat Provinsi untuk Wuryaning Yuli Astuti Kelurahan Banjarejo.
44. Penghargaan Kota Madiun sebagai Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia di Bidang Tata Kelola Limbah sekaligus peringkat ke-3 Kota Paling Berkelanjutan dalam UI GreenCityMetric 2023.
45. Penghargaan Peringkat I Kategori Kelurahan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur 2023 untuk Kelurahan Manguharjo.
46. Penghargaan untuk Camat Manguharjo atas Prestasinya Dalam Membina Kelurahan-kelurahan di Wilayah Kecamatan Manguharjo dari Gubernur Jawa Timur.
47. Penghargaan untuk Bagian Pemerintahan Sekretarian Daerah Kota Madiun atas Prestasinya Dalam Membina Kelurahan-kelurahan di Kota Madiun.
48. Penghargaan kepada Wali Kota Maidi dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur atas Dukungan dan Sinergitas Pemerintah Kota Madiun Terhadap Pelaksanaan Tugas-tugas Pemasarakatan di Kota Madiun.

49. Penghargaan Nirwasita Tantra untuk Kota Madiun kategori Kota Kecil Terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022.
50. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra untuk Wali Kota Madiun, Maidi sebagai Kepala Daerah kategori Kecil Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah 2022.
51. Penghargaan Green Leadership Jawa Timur untuk Wali Kota Madiun sebagai Terbaik Kedua Kepala Daerah Tingkat Kota Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2023.
52. Penghargaan kepada Wali Kota Madiun sebagai Pembina Proklamasi Terbaik 2023 tingkat Jawa Timur.
53. Penghargaan Kelurahan Berseri 2023 Tingkat Pratama untuk Kelurahan Kartoharjo.
54. Penghargaan Kelurahan Berseri 2023 Tingkat Pratama untuk Kelurahan Kelun.
55. Penghargaan Kelurahan Berseri 2023 Tingkat Pratama untuk Kelurahan Kuncen.
56. Penghargaan Kelurahan Berseri 2023 Tingkat Pratama untuk Kelurahan Nambangan Lor.
57. Penghargaan Kepada Wali Kota Maidi sebagai Kepala Daerah Peduli Sensor Mandiri dalam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023.
58. Penghargaan kepada Lurah Pangongangan, Eva Anjarika Rahmawati sebagai juara kategori inovasi sinergi antarlembaga dalam Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023.
59. Penghargaan kepada Babinsa Kelurahan Pangongangan, Serda Yuliawan sebagai juara kategori inovasi sinergi antarlembaga dalam Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023.
60. Penghargaan kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangongangan, Aiptu Suryadi sebagai juara kategori inovasi sinergi antarlembaga dalam Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023

61. Penghargaan untuk DisnakerKUKM Kota Madiun sebagai Pembina Produktivitas 5R tingkat Provinsi Jawa Timur.
62. Penghargaan Jatim Bangkit Award 2023 kategori Kabupaten/Kota dengan Program Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 Terbaik se-Jawa Timur oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
63. Penghargaan kepada Kota Madiun atas pencapaian pelayanan KB 238.57 persen dalam rangka world contraception day 2023 dari kepala perwakilan BKKBN Jawa Timur.
64. Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kota kepada Wali Kota Madiun, Maidi.
65. Trophy ProKlim Lestari untuk RW 11 Kelurahan Taman.
66. Trophy ProKlim Utama untuk RW 03 Kelurahan Sogaten.
67. Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 02 Kelurahan Tawangrejo.
68. Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 03 Kelurahan Nambangan Kidul.
69. Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 14 Kelurahan Nambangan Lor.
70. Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 04 Kelurahan Ngegong.
71. Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 09 Kelurahan Kejuron.
72. Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 04 Kelurahan Kuncen.
73. Penghargaan KIM Kreatif untuk KIM Pandan Arum Kota Madiun dalam khusus KIM Festival 2023 Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo RI.
74. Penghargaan The Right Man On The Right Place kategori The Most Innovative Leader With Strong Anti-Corruption Commitment kepada Wali Kota Maidi dari lensaindonesia.com.  
Terbaik I kategori Video Kreatif Dinas Kominfo Kabupaten/Kota
75. Provinsi Jawa Timur dalam Jatim Public Relation Award (JPRA) 2023 untuk Dinas kominfo Kota Madiun.  
Terbaik II kategori Pers Rilis Dinas Kominfo Kabupaten/Kota Provinsi

76. Jawa Timur dalam Jatim Public Relation Award (JPRA) 2023 untuk Dinas Kominfo Kota Madiun.
77. Terbaik III kategori Website Dinas Kominfo Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam Jatim Public Relation Award (JPRA) 2023 untuk Dinas Kominfo Kota Madiun.
78. Juara 1 kategori Poster dalam Anugerah Pewarta Warga untuk Wisang R Wijaya dan Gentur Kusuma A KIM Pesanggrahan Kelurahan Taman Kota Madiun.
79. Juara II KIM Hackathon 2023 untuk KIM Pandanarum Kelurahan Pangongangan.
80. Harapan I KIM Hackathon 2023 untuk KIM Pesanggrahan Kelurahan Taman.
81. Terbaik I Anugerah Media Humas (AMH) 2023 kategori Siaran Pers Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kota Madiun.
82. Terbaik I Program Peduli UMKM untuk Program Rasa Warga LPPL Radio Suara Madiun FM dalam Indonesia Persada.ID Award IV 2023.
83. Penghargaan kepada Kota Madiun sebagai kabupaten/kota yang telah berhasil membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa/kelurahan sesuai dengan Inpres 3/2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang menginstruksikan pembentukan Kampung KB di seluruh desa/kelurahan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
84. Penghargaan untuk SMAN 1 Kota Madiun sebagai Juara III dalam lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) Paripurna kategori SMA sederajat dari Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
85. Penghargaan Kota Madiun sebagai kabupaten/kota terbaik atas pencapaian Dinas Kesehatan kota/kabupaten dalam pelaksanaan program TBC 2023 dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

86. Penghargaan Relevan di Semua Zaman Kategori Daerah dengan Tingkat Inflasi Terendah di Jawa Timur dari Harian Surya, Tribun Jatim Network.
87. Penghargaan Bidang Pemanfaatan Pangan kepada Wali Kota Madiun dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait Kepedulian Pangan
88. Penghargaan untuk Kota Madiun sebagai Penyelenggara Terbaik Pertama Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur.
89. Juara II Jambore Satlinmas Siaga Pemilu 2024 Provinsi Jawa Timur untuk kontingen Satlinmas Kota Madiun.
90. Penghargaan TOP 5 Kategori Kelompok Replikasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas Inovasi Pendekar Berkumis (Pendidikan Kreatif Ramah Lingkungan Bersama Kurangi Emisi Bumi) SMPN 11 Kota Madiun.
91. Penghargaan Kepasda Kota Madiun terkait Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Chromebook dalam Pembelajaran Melalui Google Workspace for Education Tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
92. Penghargaan Kepada Kota Madiun terkait Pemerintah Daerah dengan Kategori Capaian Literasi Tinggi pada Jenjang SD.
93. Penghargaan Kepada Kota Madiun terkait Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh SMP Tertinggi.
94. Penghargaan Kepada Kota Madiun terkait Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh Satuan PAUD Tertinggi.
95. Penghargaan Kepada Kota Madiun terkait Pemerintah Daerah dengan Rasio Tinggi dalam Pembelian melalui SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah).
96. Penghargaan Kepada Kota Madiun terkait Pemerintah Daerah dengan Tingkat Aktivasi Akun belajar.id Tinggi.
97. Penghargaan STBM Award Paripurna Terbaik I dari Kementerian Kesehatan.
98. Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan.

99. Predikat Nasional Anugerah Anindhita Wistara Data 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
100. Penghargaan Top Digital Implementation 2023 Level Stars 4 untuk Dinas Kominfo Kota Madiun dari Majalah It Works.
101. Penghargaan Top Leader on Digital Implementation 2023 untuk Wali Kota Madiun, Dr. Maidi dari Majalah It Works.
102. Penghargaan Top CIO on Digital Implementation 2023 untuk Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Noor Aflah dari Majalah It Works.
103. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Award Jatim 2023 Kategori Kota Informatif dengan nilai 96,71.
104. Predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) RI diserahkan Wapres Ma'ruf Amin.
105. Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2023 kepada Ketua TP PKK Yuni Setyawati Maidi oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).
106. Penghargaan Impelementasi Program Smart City Terbaik dimensi Smart Living kategori kota/kabupaten.
107. Penghargaan Impelementasi Program Smart City Terbaik dimensi Smart Environment kategori kota/kabupaten.
108. Penghargaan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun atas Upaya Peningkatan Konsumsi Ikan Terbaik di Jawa Timur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
109. Penghargaan untuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun atas Peran Aktif Dalam Peringatan Hari Ikan Nasional ke-10 2023 Provinsi Jawa Timur.
110. Penghargaan kepada Camat Manguharjo, Lita Febriana Lestari sebagai Juara III Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Provinsi Jawa Timur 2023 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

112. Penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kota Madiun sebagai Penerima Apresiasi Cerdas Berkarakter dalam Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2023
113. Juara I Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Yayak Suyatno Koordinator PSM Kota Madiun. Dan sebagainya.

Terdapat 161 penghargaan untuk yang diterima oleh Walikota Madiun di Tahun 2023 ini.

Pemerintah Kota telah melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan penetapan tema pembangunan terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Tema Pembangunan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 adalah "Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Sejahtera".

**Gambar III.34. Tema Pembangunan Pemerintah Kota Madiun**



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun

Berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun sampai dengan tahun 2021, telah ditetapkan kebijakan pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan laporan kinerja Pemerintah Kota Madiun sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

**Gambar III.35. Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023**



Sumber Data : BAPPEDA Kota Madiun

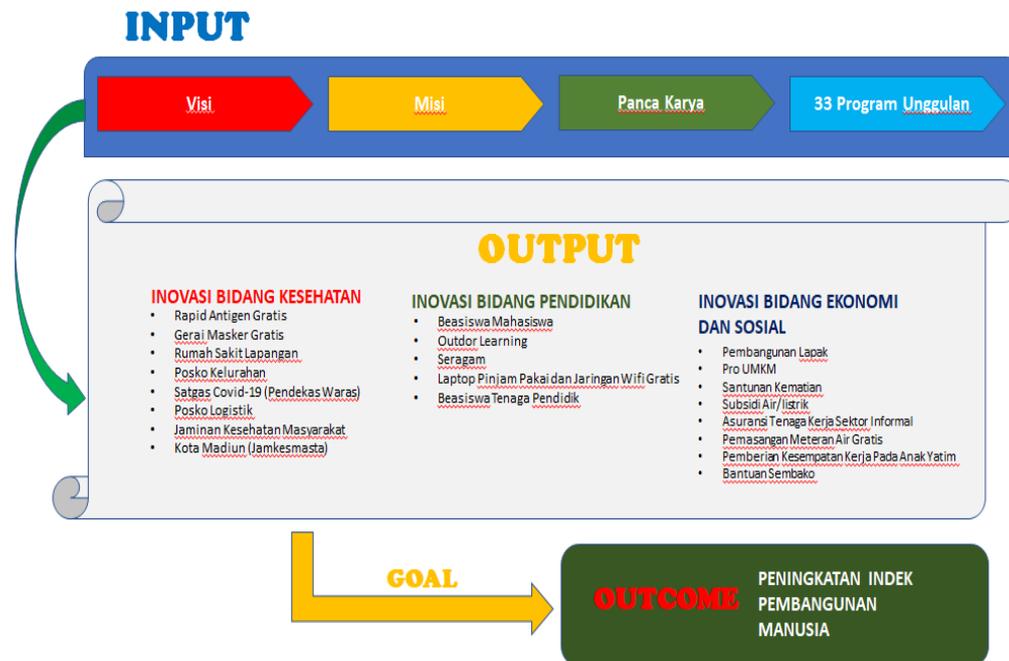
Penetapan kebijakan Pemerintah Kota Madiun juga dengan memperhatikan isu strategis, prioritas pembangunan baik nasional maupun provinsi dan pohon kinerja.

**Gambar III.36. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2023**



Sumber Data : BAPPEDA Kota Madiun

**Gambar III.37. Skema Pencapaian Outcome Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023**



Sumber Data : BAPPEDA Kota Madiun

**BAB  
IV****P  
ENUTUP****A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 7 (tujuh) indikator. Dari capaian 7 (tujuh) indikator terdapat 6 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Gini.

Kelima indikator tersebut didukung oleh 11 (sebelas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator tersebut 14 (empat belas) indikator telah melebihi target dan 3 (tiga) yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indeks Inovasi Daerah dan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

## B. Permasalahan

Permasalahan pembangunan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat
  - b. Belum optimalnya penanganan PMKS
  - c. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan
  - d. Masih ada kematian ibu dan anak
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
  - f. Penanganan PMKS perlu dioptimalkan
  - g. Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan
  - h. Penyediaan lapangan pekerjaan perlu peningkatan jaringan ketenagakerjaan
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
  - a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan dan dipelihara
  - b. Drainase perkotaan perlu ditingkatkan
  - c. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat perlu pemeliharaan kualitas
  - d. Sarana sanitasi masyarakat perlu ditingkatkan
  - e. Sarana dan prasarana persampahan perlu di tingkatkan
  - f. Luasan RTH perlu ditingkatkan
  - g. Pemanfaatan pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan
  - h. Mitigasi bencana perlu ditingkatkan

3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
  - a. Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing
  - b. Belum optimalnya kinerja BUMD
  - c. Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM
  - d. Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
  - a. Penetapan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dengan arah penerapan RB berdampak.
  - b. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
  - d. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
  - e. Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja
  - f. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - g. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - a. Masih perlu ditingkatkannya peran FKUB dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat
  - b. Peran tokoh masyarakat dan ulama masih perlu ditingkatkan
  - c. Masih terbatasnya keterlibatan dan pelestarian budaya adat masyarakat

### C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  - a. Melakukan pendataan untuk anak tidak sekolah dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan
  - b. Optimalisasi penanganan PMKS secara berkelanjutan
  - c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelatihan profesi guru (PPG)
  - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar
  - e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
  - f. Meningkatkan kualitas pendidikan
  - g. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan

- h. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru
- i. Menurunkan Angka Kematian Ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
- j. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
- k. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia.
- l. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
- m. Penanganan PMKS perlu dioptimalkan
- n. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- o. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- p. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- q. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)

- r. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
  - s. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
  - t. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
  - u. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
  - v. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
  - w. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
- a. Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
  - b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
  - c. Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
  - d. Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibat intensitas yang

tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

### 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

- a. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul.
- b. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat.
- c. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
- d. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat evitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat.
- e. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat
- f. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah.
- g. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah.
- h. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah.
- i. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku.
- j. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu sumber PAD dan dapat menggerakkan

- Belanja Barang/Jasa Daerah yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa
- k. Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM)
  - l. Pembagunan jalur sepeda wisata penghubung lapak
  - m. Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- a. Melakukan penyesuaian Road Map RB Pemerintah Kota Madiun dan rencana aksi pelaksanaan RB sesuai dengan permasalahan dan isu strategis dan permasalahan sehingga tepat sasaran
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Madiun
  - c. Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya
  - d. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem merit diantaranya assessment pegawai, penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) dan pememtaan talenta pegawai
  - e. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.
  - f. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan

- menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- g. Pelaksanaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Demangan dan Puskesmas Sukosari di tahun 2022
  - h. Melaksanakan survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas pada unit pelayanan publik.
  - i. Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  - j. Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan manajemen kinerja sektor publik.
  - k. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2023 ini telah dilakukan pengembangan dashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Penambahan fitur pada masing-masing aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
  - l. Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management Quality System-Requirement dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyipuan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen

- Anti Penyuapan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- m. Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
  - n. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- a. Melanjutkan kegiatan patroli wilayah di Kota Madiun dengan berkoordinasi dengan POLRI
  - b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara tegas
  - c. Memberikan sosialisasi Peraturan Daerah yang terkait dengan pelanggaran tantribum kepada masyarakat (Organisasi Dharma Wanita, PKK, masyarakat kelurahan, dan anak sekolah)
  - d. Memberikan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah secara persuasif dan humanis (contoh: pemberian panggilan dan pembinaan kepada badan usaha yang tidak memiliki izin usaha)
  - e. Melanjutkan sistem ronda malam di RT/RW di Lingkungan Kota Madiun
  - f. Menyelenggarakan advokasi dan kampanye anti kekerasan kepada masyarakat.